

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT**

(Studi Kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Muamalah



Oleh :

**LISA INDAH PURWITASARI
NIM 122311063**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Lisa Indah Purwitasari

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan bersama ini saya
kirin naskah skripsi Saudara:

Nama : Lisa Indah Purwitasari
NIM : 122311063
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan
dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU
Al-Amanah Tarub Tegal)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

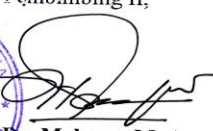
Semarang, 6 Juni 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1001




Dr. Mahsun, M. Ag.
NIP. 19671113 20501 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Lisa Indah Purwitasari
NIM : 1223111063
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JAMINAN
DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS SI BMT NU AL-
AMANAH TARUB TEGAL)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal: 13 Juni 2016 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 17 Juni 2016

Mengetahui

Ketua Sidang

Drs. Mohammad Solek, MA
NIP. 19660318 199303 1004

Sekretaris Sidang

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP: 19630801 199203 1001

Penguji I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag
NIP: 1955022 198303 1003



Penguji II

Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA
NIP: 197603627 200501 2003

Pembimbing I

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP: 1963080 1 199203 1001

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP: 196711132005011001

MOTTO

بِالْعُقُودِ أَوْفُواْ مَنْوَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu
(QS. Al-Maidah:1)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan dengan penuh keikhlasan untuk:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga karya ini terselesaikan dengan baik.
2. Nabi *akhiruzzaman*, Muhammad Saw, suri tauladan seluruh umat manusia.
3. Bapak Sigit Gunardi dan Ibu Barokah kasih sayang dan supportmu membuatku merasa kuat menghadapi hidup ini. Do'a kalian senantiasa terus kuharapkan agar langkahku esok terus maju.
4. Adiku Adella Suci Rahmadani yang selalu menantikan kesuksesanku.
5. Ade lutfi Anugerah Aji (kakak sepupu) yang mengantar serta membantu mencari referensi.
6. Sahabatku Lina Desianti dan Ummu Salamah, sahabat seperjuangan dalam mengarungi dinamika kampus, terima kasih atas persahabatan yang hangat ini. Semoga ruang dan waktu yang berbeda tidak menjadi penghalang untuk kita tetap menjalin tali silaturahmi.
7. Teman-teman kost BPI E5, yang telah menemani siang dan malamku. Terima kasih telah menjadi keluarga keduaku selama berada ditanah rantau. Kalian seperti pelangi yang indah yang memberikan warna indah dihidupku.
8. Mbak Lailatul Naziroh (dari STEKOM) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2016
Deklarator,


Lisa Indah Purwitasari
NIM: 122311063

ABSTRAK

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota dilakukan melalui suatu perjanjian kredit (perjanjian pembiayaan) antara BMT dengan anggota. Sehingga terjadi hubungan antara kedua belah pihak. Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan adalah keadaan dimana anggota pengguna dana lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasa disebut *wanprestasi*. Oleh sebab itu dari pihak BMT dapat mensyaratkan adanya jaminan yang harus diserahkan oleh anggota pengguna dana kepada BMT.

Sketsa ini berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS DI BMT NU AL-AMANAH TARUB TEGAL). Judul ini dilatarbelakangi dengan adanya praktek jaminan dalam perjanjian kredit berupa surat-surat berharga, seperti surat BPKB mobil atau sepeda motor, dan sertifikat tanah atau rumah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberi gambaran jelas mengenai praktik perjanjian kredit di BMT SM NU Al-Amanah Tarub Tegal sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Setelah dilakukan penelitian di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal, dapat disimpulkan bahwa BMT NU Al-Amanah tidak begitu memperhatikan apakah akad yang dipakai dalam pengikatan jaminan yang dilakukan BMT NU Al-Amanah hanya memperhatikan bagaimana dana yang tersalurkan kepada anggota aman dan dapat kembali dengan adanya pengikatan jaminan tersebut. Maka praktek pengikatan jaminan yang dilakukan BMT NU Al-Amanah dalam kredit tersebut sama dengan pengikatan jaminan kredit yang ada di bank konvensional, yaitu akad *rahn* sebagai produk, nasabah memerlukan sejumlah uang dan BMT setuju memberikan pinjaman (*qard*). Atas pinjaman tersebut, nasabah memberikan barang yang digadaikan (*rahn*) kepada bank syariah sebagai agunan. Selain itu pihak BMT harus memperoleh jaminan dari nasabah sebagai jaminan kredit yang diberikannya. Oleh karena itu, BMT NU Al-Amanah harus lebih memperhatikan akad yang digunakan dalam pengikatan jaminan tersebut, mengingat hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau

perjanjian. Akad menjadi bagian pertama setiap transaksi ekonomi. Maka akad yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi hendaknya dibuat secara benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Karena dari akadlah semua dapat dikatakan sah atau tidak sah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah meridhai dan mengilhami selama masa penulisan. Tanpa ridha dan ilham-Nya penulis tidak akan mampu untuk mempersembahkan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada kekasih Allah, junjungan kita nabi Muhammad SAW yang selalu membimbing umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, sebagai penulis pemula tidak akan mudah untuk menulis sebuah skripsi yang bermutu tinggi maka dengan kerendahan hati penulis akan menyajikan sebuah karya tulis atau tugas akhir dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS DI BMT NU AL-AMANA TARUB TEGAL)”

Skripsi ini mengungkapkan praktek dalam perjanjian kredit dan membahas kesyari'ahan praktek jaminan dalam perjanjian kredit pada BMT NU AL-AMANA Tarub Tegal. Perlunya kajian mengenai praktek jaminan dalam perjanjian kredit ini dikarenakan saat ini BMT memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Skripsi ini berusaha untuk memberikan pembuktian mengenai kesyari'ahan praktek jaminan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh BMT NU AL-AMANA Tarub Tegal.

Dari hasil penelitian penulis juga berusaha memberikan analisis-analisis untuk menghindari kesalahpahaman tentang praktek perjanjian kredit. Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk menambah pemahaman penulis mengenai praktek jaminan dalam perjanjian kredit serta dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang berminat terhadap perjanjian kredit.

Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah ikut serta terlibat dan

membantu penyusunan skripsi ini baik berupa arahan maupun semangat yang telah diberikan kepada penulis. Pernyataan terima kasih yang sangat dalam penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Akhmad Arif Junaidi, S.Ag M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Afif Noor selaku ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum
4. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku dosen wali yang telah bersedia membimbing dari awal semester hingga akhir semester.
5. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag dan Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Kepada keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta keluarga besar program sarjana strata 1 UIN Walisongo Semarang dan seluruh dosen yang telah memberi ilmu serta bimbingan hingga terciptanya karya ini
7. Manager dan karyawan BMT SM NU Al-Amanah Tarub yang memberi pelayanan terhadap mahasiswa dengan baik, memberi ijin untuk melakukan penelitian, dan memberikan bantuan dalam proses pengumpulan data
8. Ibu dan Bapak yang tercinta yang mengasuh, mendidik, melindungi serta memberikan do'a dan dukungan moral maupun materiil.
9. Semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan pada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tidak mungkin seperti ini bila tidak engkau kehendaki baik dalam pemilihan bahasa, teknik

penulisan dan analisis adalah menjadi tanggung jawab penyusun pribadi.

Kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penyusun berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah serta sebagai wujud pengabdian penyusun kepada masyarakat, ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah SWT memberikan balasan yang layak. Amin.

Semarang, Juni 2016

LISA INDAH PURWITASARI
NIM: 122311063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Metode penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KONSEP AKAD QARD DAN RAHN DALAM ISLAM	
A. Perjanjian Kredit.....	20
B. Mudharabah	36
C. Rahn.....	46
BAB III PERJANJIAN KREDIT DI BMT SM NU AL-AMANAHTARUB TEGAL	
A. Profil Tentang Kantor BMT SM NU AL-AMANAHTarub.....	66
B. Syarat-syarat Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal.	73

C. Praktek Jaminan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal.....	78
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BMT NU AL- AMANAH TARUB TEGAL	
A. Akad Perjanjian Kredit	82
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kredit	92
BAB V PENUTUP	
C. Kesimpulan.....	106
D. Saran.	108
E. Penutup.	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam belakangan ini menunjukkan peningkatan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ekonomi Islam juga menyajikan pandangan dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Dasarnya ada dalam Al-Qur'an dan As-sunah sebagai petunjuk bagi perilaku manusia.¹

Perkembangan pesat yang dialami oleh Perbankan Syari'ah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam ditengah masyarakat. Secara kelembagaan Perbankan Syari'ah di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional Perbankan Syari'ah.²

Baitul Maal Wattamwil (BMT) yaitu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah) menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT merupakan suatu lembaga

¹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press 2008, h. 35.

²*Ibid.* h. 37.

yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan shodaqoh. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisah dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bahwa yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*).³

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil.⁴

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip syari'ah dalam

³Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 363.

⁴Muhamad Ridwan, *MANAJEMEN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 73.

kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keIslaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

BMT mempunyai dua fungsi, yaitu: mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT adalah pemberian biaya kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi kegiatan.⁵

BMT merupakan *leading sector* untuk pembiayaan usaha mikro, dikarenakan BMT merupakan salah satu multiplier dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan Bank Syari'ah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah (*grass root*). Dan ini membawa angin besar bagi usaha sektor kecil, karena problem yang paling besar dalam pengembangan usaha kecil terletak pada keuangan dan permodalan.⁶

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota dilakukan melalui suatu perjanjian kredit (perjanjian pembiayaan) antara BMT dengan anggota. Sehingga terjadi hubungan antara kedua

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonsia, 2004, h. 96.

⁶Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press 2008, h. 37.

belah pihak. Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan adalah keadaan dimana anggota pengguna dana lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasa disebut *wanprestasi*. Oleh sebab itu dari pihak BMT dapat mensyaratkan adanya jaminan yang harus diserahkan oleh anggota pengguna dana kepada BMT.

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan, bahwa: “Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari Nasabah debitur.

Begitu juga penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, menegaskan bahwa “Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syari’ah di Bank

Syar'ah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syari'ah dan UUS". Untuk itu Bank Syari'ah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syari'ah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah penerima fasilitas. Dan untuk memperoleh keyakinan tersebut, Bank Syari'ah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah penerima fasilitas.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Yang dimaksud dengan jaminan kredit atau pembiayaan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan
2. Jaminan kredit atau pembiayaan dalam arti luas meliputi: watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Dalam arti sempit jaminan kredit atau pembiayaan adalah agunan.
3. Jenis agunan kredit/pembiayaan terdiri dari:
 - a. Agunan pokok yaitu berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan.

- b. Agunan tambahan yaitu berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai.
4. Bank konvensional maupun bank syariah harus memperoleh agunan dari nasabah debitur/ penerima fasilitas sebagai jaminan kredit/pembiayaan yang diberikannya. Ketentuan ini bersifat *legal mandatory*, sehingga wajib ditaati.⁷

Sebagian besar pembiayaan BMT disalurkan dalam bentuk barang dan jasa yang diberikan untuk anggotanya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang dan jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu, baru ada uang, maka anggota dipacu untuk memproduksi barang dan jasa atau mengadakan barang dan jasa. Selanjutnya barang yang diadakan menjadi barang jaminan (*collateral*) hutang.⁸

Dalam perjanjian kredit pembiayaan akan selalu berkaitan dengan masalah jaminan. Telah diketahuai jaminan mempunyai arti yang sangat penting dalam pelaksanaan kredit. Dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, bank dan lembaga pembiayaan akan selalu mengadakan upaya pencegahan atau menjaga agar bank dan lembaga pembiayaan tidak dirugikan apabila dikemudian hari

⁷Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah 'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 42.

⁸Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah 'ah*, Yogyakarta : Safiria Insani Press 2008, h. 46.

penerima kredit (debitur) wanprestasi atau dengan kata lain tidak dapat mengembalikan kredit pencegahan itu jika kredit itu diikuti dengan peningkatan jaminan. Jadi apabila debitur wanprestasi jaminan akan berfungsi pengganti pembayaran kredit yang telah diberikan oleh bank dan lembaga pembiayaan.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri adanya hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan, sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung perorangan tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya.⁹

Rahn (gadai), secara terminologi yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu.¹⁰ Menurut Dewan Syari'ah Nasional, *Rahn*(gadai) yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Sedangkan menurut Bank Indonesia, *rahn*(gadai) adalah akad penyerahan barang atau harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada Bank (*murtahin*)

⁹ Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980, h. 46.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 187

sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.¹¹ Allah SWT berfirman:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الْاُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (QS. Al-Baqarah: 283)

Salah satu BMT menerapkan sistem jaminan dalam pembiayaan adalah BMT NU AL-AMANA. BMT ini menawarkan salah satu produk pembiayaan yang dapat memfasilitasi para anggotanya untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dan diantara produk pembiayaan yang disyaratkan adanya suatu jaminan yaitu *al qard*.

Dalam buku Syafi'i Antonio disebutkan bahwa, *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹² Jadi ketika BMT menjalankan produk pembiayaan tersedia BMT bertindak sebagai pemberi

¹¹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 45.

¹² Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 131.

dana kepada anggota dan dana tersebut harus dikembalikan oleh anggota sesuai dengan kesepakatan. Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Hadiid: 11)

Dalam memberi pembiayaan, ada ketentuan barang yang dijadikan jaminan harus disimpan oleh pihak BMT. Namun hal ini dapat menghambat usaha yang dilakukan oleh anggota pengguna dana. Apabila barang yang dijadikan jaminan tersebut merupakan barang yang digunakan untuk usahanya, oleh karena itu untuk mempermudah anggota pengguna dana, maka pihak BMT pada pembiayaan melakukan perjanjian pengikat jaminan yang dilakukan.

Semestinya dalam hutang piutang itu, jika orang yang berhutang pada saat jatuh tempo tidak bisa membayar hutangnya, maka orang yang berpiutang mempunyai dua pilihan, yaitu membebaskan hutangnya atau memberi masa tenggang waktu. Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah:280).

Namun pada kenyataannya di BMT NU Al-Amanah ada satu klausul yang menyebutkan bahwa ketika yang berhutang tidak bisa membayar hutang, secara otomatis telah memberikan kuasa ke pihak yang berpiutang atas barang jaminannya. Walaupun demikian pada kenyataannya kontrak itu tetap ditanda tangani oleh pihak yang berhutang.

Pada implementasi dalam melakukan transaksi pembiayaan, sebelumnya antara pihak BMT dan nasabah selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian keduanya secara otomatis telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Namun dalam prakteknya kadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, baik karena keadaan memaksa, secara sengaja maupun tidak sengaja.¹³

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun menganggap penting dan perlu adanya tinjauan hukum atau penelitian hukum Islam. Untuk itu penyusun ikut andil dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal)**”

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, (Jakarta: Intermedia, 1996), h. 1.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek perjanjian kredit di BMT SM NU Al-Amanah Tarub Tegal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kredit di BMT SM NU Al-Amanah Tarub Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum Islam mengenai perjanjian kredit yang dilakukan di BMT NU SM Al-Amanah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jaminan dalam perjanjian kredit di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal.
2. Untuk mengetahui apakah praktek tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

D. Manfaat Penulisan

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam, dalam rangka memperkaya khasanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan perjanjian kredit di BMT NU Al-Amanah Tarub.
2. Sebagai bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan penerapan denda dan tambahan bagi hasil perspektif hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari anggapan terjadinya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan denda dan tambahan bagi hasil memang sudah banyak. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang serupa, diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Mohammad Kadhapi, yang berjudul “Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Eksekusi Tanggungan Jaminan Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur di Medan”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa eksekusi hak tanggungan yang berdasarkan pada *grosse* akta pengakuan utang dan sertifikat hak tanggungan melalui Pengadilan Negeri merupakan salah satu cara yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, eksekusi hak tanggungan dapat dilaksanakan dengan menjual seluruh atau sebagian harta kekayaan debitur yang merupakan jaminan melalui lelang, dan hasil lelang sebagian atau sepenuhnya akan

diambil untuk membayar lunas hutang kepada kreditur setelah dikurangi biaya eksekusi biaya lelang.¹⁴

Skripsi yang disusun oleh Arya Manggala Yudha, yang berjudul “Eksekusi Lelang Obyek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengaturan perjanjian kredit yang jaminan hak tanggungan dan kekuatan hukum sertifikat hak tanggungan dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember, dimana dengan adanya bukti sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat digunakan oleh pemegang Hak Tanggungan (kreditur) untuk melakukan eksekusi obyek hak tanggungan jika terjadi kredit macet¹⁵.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Karena penelitian ini dilaksanakan dilapangan yaitu tentang pelaksanaan perjanjian kredit di BMT NU Al-Amanah.

¹⁴ Mohammad Kadhapi, “*Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur di Medan*”, Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan (2012)

¹⁵ Arya Manggala Yudha, “*Eksekusi Lelang Objek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jember*”, Skripsi Sarjana Universitas Jember (2008), diakses

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BMT NU Al-Amanah yang bertempat di Jalan Karangjati No. 25 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal sebagai lokasi tempat penelitian.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada secara obyektif, guna mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian kredit di BMT NU Al-Amanah Tarub, kemudian menganalisa berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, supaya mendapatkan kesimpulan.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu manajer beserta staffnya BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal.

5. Data yang dikumpulkan

Dalam pengumpulan data, menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data dari buku, jurnal, artikel, dan terbitan lainnya. Sedangkan studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data-data dari manajer, dan karyawan.

6. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁶ Atau data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- 1) Manajer
- 2) Karyawan

b. Sumber Data Sekunder

Yakni merupakan sumber data yang mendukung yang diperoleh dari buku-buku sebagai berikut:

- 1) Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press 2008
- 2) Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, h. 30.

- 3) Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), Yogyakarta: UII Press, 2004
- 4) Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonsia, 2004
- 5) Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006
- 6) Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: pustaka SM, 2007
- 7) Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- 8) Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, Jakarta: Intermasa, 1996
- 9) Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview yaitu pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.¹⁷ Yang diwawancarai yaitu manajer dan karyawan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang jelas, valid

¹⁷*Ibid*, h. 105.

dan memudahkan penyusun menganalisa pokok masalah yang dibahas.

- b. Dokumentasi yaitu ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, buku-buku, atau surat kabar dan lain sebagainya.¹⁸

8. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu mengkaji data berdasarkan pelaksanaan perjanjian kredit di BMT NU Al-Amanah Tarub. Selanjutnya membahas dan menilai perjanjian kredit tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

9. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para pihak yang terkait. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan tentang suatu proses atau peristiwa dengan tanpa menggunakan perhitungan atau angka-angka.¹⁹

¹⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 112.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet 21, 2005, h. 11.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu konsep akad *mudharabah* dan *rahn* dalam Islam. Terdiri dari sub bab, sub bab pertama tentang perjanjian kredit, terdiri dari pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, berakhirnya perjanjian, pengertian kredit dan pengertian perjanjian kredit. Sub bab kedua yaitu pengertian *mudharabah*, dasar hukum, dan hikmah *mudharabah*. Sub bab ketiga yaitu pengertian *rahn*, syarat dan rukun *rahn*. Hal ini sebagai langkah untuk mempermudah proses analisis mengenai klausul yang menyebutkan bahwa ketika yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya secara otomatis telah memberikan kuasa kepada pihak yang berpiutang atas barang jaminannya.

Bab ketiga yaitu tentang perjanjian kredit di BMT NU Al-Amanah Tarub. Terdiri dari sub bab, sub bab pertama tentang profil BMT SM NU Al-Amanah Tarub terdiri dari sejarah berdirinya, visi misi dan tujuan, struktur organisasi dan keanggotaan. Sub bab kedua tentang syarat-syarat perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di BMT SM NU Al-Amanah Tarub Tegal. Sub bab ketiga tentang praktek dalam

pelaksanaan perjanjian pemberian kredit di BMT SM NU Al-Amanah Tarub Tegal.

Bab keempat yaitu tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jaminan dalam perjanjian kredit di BMT NU Al-Amanah Tarub dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yaitu akad perjanjian kredit dan yang kedua yaitu tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kredit.

Bab kelima berisi penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

BAB II

KONSEP AKAD MUDHARABAH DAN RAHN DALAM ISLAM

A. Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Menurut bahasa ‘*Aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*Ar-Rabtu*), yaitu “Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salahsatunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda”.
- b. Sambungan (*‘Akdah*), yaitu “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatkatnya”.
- c. Janji (*Al-‘Ahud*), yaitu dijelaskan dalam Al-Quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”(QS:Al-Imran:76)

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa setiap ‘*aqdi* (persetujuan) mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Perjanjian (*‘ahdu*)
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih

c. Perikatan (*'aqdu*)¹

Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada aqad atau perjanjian:

- a. Menurut Pasal 262 Mursyid al-Haira, akad merupakan “Pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.”
- b. Menurut penulis, akad adalah, “pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”

Dari kedua definisi diatas memperlihatkan bahwa:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akad hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karna akad adalah ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “Hukum Akad” (*hukum al-‘Aqdi*).²

Pengertian akad dalam terminologi lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
- b. Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.
- c. Berkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
- d. Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurutnya syara’ dengan cara serah terima.³

Akad (perjanjian) dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam dapat diartikan sebagai pertalian ijab (pernyataan

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2010), h. 69

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 46

melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat (hukum) yang berpengaruh pada objek perikatan. Semua perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak masing-masing pihak dan sesuai dengan syariat.⁴ Para ahli Hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai “pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.”⁵

Akad adalah bagian dari macam-macam *tasharruf*. Yang dimaksud *tasharruf* yaitu segala yang keluar dari manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya.

Tasharruf dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Tasharruffi’li* (perbuatan) yaitu usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya
- b. *Tasharru qauli* (perkataan) yaitu perkataan yang keluar dari lidah manusia tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum.

⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), h. 45

Tasharrufqauli terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Tasharrufqauli aqdi* adalah suatu yang dibentuk dari dua ucapan atau dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab qabul. Pada bentuk ini, ijab dan qabul yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.
- 2) *Tasharrufqauli ghairu aqdi* adalah perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan qabul.⁶

Dalam pandangan syariah suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk meningkatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut diungkapkan dalam bentuk suatu pernyataan yang kemudian disebut sebagai ijab dan kabul, yang biasanya dilakukan terlebih dahulu oleh pihak pertama, kemudian oleh pihak kedua.

Bermuamalah dalam ijab dan kabul adalah pernyataan melakukan ikatan yang dilakukan oleh pembeli dan diikuti pernyataan menerima ikatan oleh penjual. Setelah adanya pernyataan tersebut maka akad jual beli tersebut telah sah, karena pembeli telah menerima barang dan penjual menerima

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, h. 48

harganya. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan padamu bacakan dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”

Kemudian Q.S An-Nahl ayat 91 Allah berfirman:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

”Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu).Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Hal-hal pokok yang dihindari dalam perjanjian menurut syariah, antara lain:

a. *Riba* atau *Interest*

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara *linguistic riba* juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba

berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.⁷

b. Gharar atau Dubiousness in Contract

Unsur *gharar* artinya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar. *Gharar* adalah suatu akad yang memiliki akibat lebih dari satu kemungkinan dan yang paling sering terjadi adalah kemungkinan terburuk.

2. Rukun dan Syarat Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi rukun syarat yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam.

Rukun suatu perjanjian adalah sebagai berikut:⁸

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari beberapa orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.

⁷ Muhammad. Syafi'i Antonio, *Syariah Dari Teori ke Praktis*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 37

⁸ H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 21

- c. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d. *Sighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran hendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.⁹

Sedangkan syarat perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum *mukallaf* secara langsung, hukumnya tidak sah
- b. Objek akad itu, diakui oleh syara'. Obyek akad ini harus memenuhi syarat:
 - 1) Berbentuk harta
 - 2) Dimiliki seseorang
 - 3) Bernilai harta menurut syara'
- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.

menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara, dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa ada imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara’

- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan
- e. Akad itu bermanfaat
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul
- g. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi
- h. Tujuan itu harus jelas dan diakui oleh syara’¹⁰

3. Asas-asas Perjanjian

Hukum Islam juga mengenal asas-asas perjanjian, yang antara lain:¹¹

a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian), maupun dalam menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi

¹⁰ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 105

¹¹ *ibid*, 34

sengketa.Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah Islam.

Asas kebebasan ini bertujuan untuk menjaga agar klausul-klausul yang dicantumkan dalam akad yang dibuat oleh para pihak tidak menimbulkan kezaliman, paksaan, dan penipuan kepada salah satu pihak dalam akad, apabila terdapat unsur-unsur tersebut dalam akad, maka legalitas akad dianggap meragukan, bahkan tidak sah.

b. *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas kesetaraan ini memberikan kedudukan yang sama kepada para pihak. Karena itu, dalam menyusun suatu akad atau perjanjian, masing-masing pihak dapat mengajukan klausul-klausul menyangkut hak dan kewajiban mereka atas dasar kesetaraan ini.

c. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Dalam melakukan pembiayaan, asas keadilan ini diimplementasikan antara lain dalam akad pembiayaan yang dibuat antara bank dengan nasabah yang harus memuat hak dan kewajiban secara proporsional. Asas ini bertujuan agar para pihak yang melakukan akad tidak melakukan penganiayaan (kezaliman).

d. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Kerelaan (*ridha*, *al-taradhi*) adalah sikap batin yang abstrak. Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah kerelaan telah dicapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikator yang dimaksud adalah formulasi (*sighat*) ijab qabul. Karena itu, formulasi ijab *qabul* harus dibuat dengan jelas dan rinci sedemikian rupa sehingga dapat menerjemahkan secara memadai bahwa para pihak dipastikan telah mencapai kondisi kerelaan ketika akad dilakukan.

e. *Ash-Shidiq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Ajaran Islam dengan tegas melarang semua bentuk kebohongan dan penipuan. Allah memerintahkan kepada seluruh umat muslim untuk berlaku jujur dalam segala urusan dan perkataan.

Apabila asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas kejujuran dan kebenaran, dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.

f. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Asas yang tidak kalah penting dalam bermuamalah tidak secara tunai adalah dibuatnya akad

secara tertulis, ada saksi, dibacakan, dan adanya agunan (*rahn*). Asas tertulis (*kitabah*) ini penting karena merupakan dasar dari prinsip kehati-hatian dan hukum pembuktian dalam bermuamalah atau keperdataan.

g. *Maslahah* (Kemaslahatan)

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawidan ukhrawi, materiil, dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu kepatuhan syari'ah dan membawa manfaat serta membawa kebaikan.

h. *Amanah*

Dengan asas amanah, masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.¹²

4. Macam-macam perjanjian

Macam-macam perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. *Aqad munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang

¹² Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 134

diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. Misalnya: seseorang mengatakan “saya jual sepeda kepada kawan saya ini”, lalu dikabulkan oleh seorang lagi, maka berwujud akad, serta memperoleh hukumannya pada waktu itu juga. Si pembeli memiliki sepeda dan si penjual memiliki uang.

- b. *Aqad mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Misalnya: Si A berkata kepada si B “jika aku jadi keluar negara maka engkaulah menjadi wakilku”.
- c. *Aqad mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. Misalnya: saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian pada awal

tahun depan. Kemudian pembeli mengatakan, “saya terima”.¹³

5. Berakhirnya Perjanjian

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlakunya perjanjian
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berjanji
- c. Salah satu pihak yang berjanji meninggal dunia¹⁴

6. Pengertian Kredit

Kredit dalam pengertian bahasa adalah bagian, jatah atau membagi-bagi. Adapun pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan, cicilan dalam jumlah-jumlah tertentu dalam beberapa waktu secara tertentu, lebih mahal dari harga kontan.

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Misalnya seseorang membeli mobil ke sebuah Dealer dengan uang muka 10% dan sisanya dibayar secara

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 50

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan.

7. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah persetujuan dan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara bank dengan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang telah disepakati.¹⁵

Perjanjian kredit menurut hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yaitu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Perjanjian kredit yang menunjukkan unsur pinjam meminjam di dalamnya yaitu pinjam meminjam antara bank dengan debitur. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa “pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

¹⁵ Thomas Suyitno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), h. 13

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dengan penyerahan uang oleh pihak kreditur kepada debitur. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi (kreditur) dan penerima (debitur) mengenai hubungan-hubungan hukum yang timbul lagi keduanya.

Namun dalam praktek perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, penjaminan hutang (penanggungan hutang) oleh pihak ketiga yang bersedia harta kekayaannya dijadikan objek yang dijaminakan dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur.

Dalam membuat perjanjian kredit terdapat beberapa judul dalam praktik perbankan tidak sama satu sama lain, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan kredit, dan lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian tersebut berbeda-

¹⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 385

beda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.¹⁷

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adharabah* yang berarti secara harfiah adalah memukul atau berjalan. Pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses seorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya.

Selain *al-dharabah*, tersebut juga *qirad*, yang berasal dari *Al-Qardu*, berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungannya.¹⁸ Istilah *mudharabah* dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i.¹⁹

Menurut pendapat ahli fiqih *mudharabah* yaitu suatu perjanjian dimana seorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan

¹⁷ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 15

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), h. 135

¹⁹ Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), h. 26

yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul mal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa *mudharabah* adalah bentuk kerja sama dalam bidang perdagangan antar dua belah pihak, yang satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain sebagai pengelola modal sedangkan keuntungan hasil usaha, besarnya disesuaikan dengan kesepakatan pada waktu perjanjian.

²⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema insani, 2001), h. 95

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan pada ayat-ayat berikut:

- a. Surat Al-Muzammil ayat 20:

وَالْآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan yang lainnya ada orang-orang yang berusaha dimuka bumi mencari karunia Allah”(QS. Al-Muzammil: 20)²¹

- b. Surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Maka apabila telah ditunaikan salat, maka hendaklah kamu bertebaran dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.(Al-jumu'ah: 10)²²

- c. Surat AL-Baqarah ayat 198

²¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1998, h. 1181.

²² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1998, h. 1129

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

“Tidaklah dosa bagi kamu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu berangkat dari Arafah (selesai wuquf), maka berzikirlah kamu kepada Allah di Masy‘aril Haram. Dan ingatlah Allah sebagaimana Dia telah menunjuki kamu meskipun kamu sebelum itu sungguh termasuk orang-orang yang sesat . (QS. AL-Baqarah: 198)²³

Dalam surat al-Muzamil ayat 20 dapat diketahui bahwa *mudharabah* merupakan salah satu aktifitas ekonomi yang diperbolehkan dan dianjurkan oleh Allah SWT. Hal ini terlihat dari kata “yadhribu” yang memiliki kesamaan dengan istilah *mudharabah* dengan akar kata “dharaba”.

Surat Al-Jumu‘ah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 198 ini sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha guna mencari karunia Allah SWT. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dengan melakukan kerja sama dalam kontrak *mudharabah*, sebagai mana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan

²³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1998, h. 56

membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Perniagaan itu mendapatkan keuntungan yang banyak dan beliau pun mendapat bagian dari keuntungan itu.

3. **Hikmah *Mudharabah***

Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syari'at membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal). Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja.²⁴

Dari penjelasan di atas maka hal itu sangat membantu orang fakir miskin untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga terhindar dari pengangguran. Tidak jarang terjadi, karena adanya bantuan modal dari pihak lain itu, orang bisa mengembangkan bakatnya dalam lapangan ekonomi dan bahkan ada diantara mereka akhirnya sampai

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1980, h. 32

mencapai tingkat kehidupan sebagai pemilik modal besar. Sistem *mudharabah* semakin terasa urgensinya untuk menjaga kesenjangan kaya dan miskin atau untuk menghindari kecemberuan sosial.

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun qiradh ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan.²⁵

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Adapun syarat-syarat *mudharabah* yaitu:

- a. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), h.

yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.

b. Yang terkait dengan modal, disyaratkan:

- 1) Berbentuk uang
- 2) Jelas jumlahnya
- 3) Tunai
- 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal.

Jika modal itu berbentuk barang, menurut para ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Akan tetapi, jika modal itu berupa wadi'ah (titipan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal *mudharabah*.

- c. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- d. Melafazkan ijab dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
- e. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barangbarang tertentu, sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang

mengikat sering menyimpang dari tujuan akad, yaitu keuntungan.²⁶

5. Asas-Asas Perjanjian *Mudharabah*

Asas-asas atau kandungan dari perjanjian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian *mudharabah* dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. Namun, seyogyanya perjanjian *mudharabah* dibuat tertulis. Ini sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjianperjanjian pinjaman dibuat secara tertulis, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk menghindari salah tafsir yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara *shahib al-mal* dan *mudharib*.
- b. Perjanjian *mudharabah* dapat pula dilangsungkan antara beberapa *shahib al-mal* dan satu *mudharib* atau antara satu *shahib al-mal* dan beberapa *mudharib*. Bahkan tidak mustahil dalam perjanjian *mudharabah* terlibat beberapa *shahib al-mal* yang melakukan transaksi di satu pihak dengan pihak lain yang terdiri

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), h.

atas beberapa *mudharib* sekalipun hanya menggunakan satu dokumen perjanjian saja.

- c. Bila modal tidak diserahkan oleh *shahib al-mal*, maka perjanjian *mudharabah* tidak sah, karena pada hakikatnya kewajiban utama *shahib al-mal* ialah menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib*.
- d. Para pihak yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- e. *Shahib al-mal* berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudharib*, sedangkan *mudharib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola kegiatan usaha tersebut dan berusaha memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- f. *Shahib al-mal* berhak memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *mudharabah* apabila usaha tersebut telah diselesaikan oleh *mudharib* dan jumlah hasil likuidasi itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.
- g. *Shahib al-mal* tidak dapat meminta jaminan dari *mudharib* atas pengambilan investasinya. Persyaratan yang demikian itu di dalam perjanjian *mudharabah* batal dan tidak berlaku.

- h. *Mudharib* wajib mengembalikan pokok dana investasi kepada *shahib al-mal* ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya.
- i. *Mudharib* wajib mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah* selama mengurus urusan-urusan *mudharabah* yang bersangkutan.
- j. *Shahib al-mal* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*.
- k. Modal harus disediakan oleh *shahib al-mal*
- l. Keuntungan dibagi menurut perbandingan berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) yang harus diperjanjikan sebelumnya.
- m. Pembagian keuntungan tidak dibenarkan untuk dilakukan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian dan telah dihapuskannya (*written off*) kerugian itu, dan terhadap modal *shahib al-mal* yang ditanamkan telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan).
- n. Apabila terjadi kerugian, maka *shahib al-mal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya. Sedangkan *mudharib* tidak menerima remunerasi (imbalan) apapun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya).

- o. Tanggung jawab shahib al-mal terbatas hanya pada jumlah modal yang telah ditanamkannya. Asas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, karena apabila tidak demikian berarti tanggung jawab shahib al-mal tidak terbatas, maka tidaklah patut bagi shahib al-mal hanya untuk menjadi sleeping partner.

C. Rahn

1. Pengertian *Rahn*

Menurut bahasa, gadai (al *rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Menurut istilah syara' *ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya:

- a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- b. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
- c. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
- d. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu
- e. Menjadikan harta sebagai jaminan hutang
- f. Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang

- g. Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas hutang
- h. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang²⁷

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang. *Ar Rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung dan terjerat, disamping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal dan jaminan.

Pengambilan kata gadai dengan istilah *rahn* itu terambil dari ungkapan Allah dengan kata “*farihaanu*” dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikannya amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

²⁷ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.

Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka ia sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kata *farihaanu* dalam ayat tersebut diartikan sebagai *maka hendaklah ada barang tanggungan*. Kemudian dilanjutkan dengan *maqbudhah* yang artinya *yang dipegang (yang berpiutang)*. Dari kata itulah dapat diperoleh suatu pengertian bahwa secara tegas *rahn* adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat diantara keduanya. Meskipun pada dasarnya tanpa hal tersebut pun pinjam meminjam tersebut tetap sah. Namun untuk lebih menguatkannya, maka dianjurkan untuk menggunakan barang gadai.

Menurut Zainudin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai *borg* ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum di bayar, maka *borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.

Sedang menurut pendapat Syafi'i Antonio, *ar-Rahn* (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Menurut beberapa madzhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang paling penting penyerahan itu bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.

Dalam hal gadai Ghuftron A. Mas'adi, mengemukakan bahwa yang dimaksud *ar-Rahn* (gadai) adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan). Sedangkan di dalam syari'ah, *ar-Rahn* itu berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, bila pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya utang.

Sedangkan menurut syara' apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak ataupun berupa ternak berada di bawah kekuasaan (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam

hukum Islam tidak dikenal “bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi *rahn* (gadai syari’ah) pemberian gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhun* (barang jaminan/agunan).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁸ Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Muddassir ayat: 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap pribadi terikat/tertahan (*rahinah*) atas apa yang telah diperbuat”.

2. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar huku *rahn* bersumber dari Al-Qur’an, hadits, dan kesepakatan para ulama (ijma’), antara lain:

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: darul-kitab al-arabi, 1987), cetakan ke-8, vol.III, h. 196

1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.

2) Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّهْنُ هُوَ يُرْكَبُ
بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ
وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ (رواه البخارى)

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. Bersabda, “Dibolehkan menunggang hewan gadaian yang diberi makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil air susu adalah memberi makan.” (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i)²⁹

3) Ijma’

Dari hadits dan ayat diatas, para ulama telah sepakat (ijma’) bahwa barang sebagai jaminan utang (*rahn*) dibolehkan (*jaiz*) baik dalam bepergian (*safar*) maupun tidak dalam bepergian.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006), h.189

4) Hukum *Rahn* Menurut Syara'

Rahn hukumnya adalah jaa'iz (boleh) tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Karena *rahn* adalah jaminan utang, oleh karena itu tidak wajib, seperti halnya kafalah hukumnya juga tidak wajib.

Adapun ayat QS. Al-Baqarah: 283

فَرَهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”

Maka perintah pada ayat ini adalah bersifat *irsyaad* (pengarahan kepada yang lebih baik) bagi kaum Mukmin, bukan perintah yang bersifat wajib. Hal ini berdasarkan ayat setelahnya.

“Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya). QS. Al-Baqarah ayat 283

Karena di dalam ayat ini, juga Allah swt memerintahkan adanya *rahn* ketika tidak menemukan seorang juru tulis. Karena menuliskan dan mendokumentasikan utang piutang hukumnya tidak wajib, maka begitu juga solusi pengganti penulisan (yaitu *rahn*), hukumnya juga tidak wajib.³⁰

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 110

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Rahn*

a. Rukun *Rahn*

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Namun bila digabungkan, menurut jumhur ulama, rukun *rahn* ada lima:³¹

- 1) *Rahin* (orang yang menggadaikan)
- 2) *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
- 3) *Marhun/Rahn* (objek/barang gadai)
- 4) *Marhun bih* (utang)
- 5) *Sighat* (ijab *qabul*)

b. Syarat-Syarat *Rahn*

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn*, yaitu:

1) Para pihak dalam pembiayaan *rahn* (*rahin* dan *murtahin*)

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus cakap bertindak menurut hukum (*ahliyyah*)

2) *Marhun* (barang)

a) Karakteristik Barang

Menurut ahli Islam (*fuqaha*), karakteristik barang jaminan utang adalah:

- 1) Bernilai harta dan dapat diperjual belikan
- 2) Jelas dan tertentu
- 3) Milik sah orang yang berhutang

³¹ Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah, h. 257

- 4) Tidak terkait dengan hak orang lain
- 5) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat
- 6) Boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya

b) Jenis Barang

Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjily tidak menjelaskan jenis barang yang dapat dijadikan jaminan hutang.

Dengan melihat praktek Nabi saw. Dan para sahabat, barang yang dapat dijadikan jaminan hutang (*rahn*) dapat berupa, baju besi, hewan ternak dan rumah. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa barang yang dapat dijadikan jaminan hutang (*rahn*) adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak.

3) *Marhun bih* (hutang)

Hutang (*marhun bih*) wajib dibayar kembali oleh debitur (*rahin*) kepada kreditur (*murtahin*). Hutang boleh dilunasi dengan agunan, dan hutang harus jelas serta tertentu (dapat dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya)

4) *Adanya* kesepakatan (*sighat*) atau ijab qabul

Bentuk-Bentuk *Rahn*

Rahn yang disepakati oleh ulama memiliki tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. *Rahn* yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang
- b. *Rahn* yang terjadi setelah munculnya hak atau setelah munculnya hak atau setelah munculnya tanggungan utang. *Rahn* ini juga sah berdasarkan kesepakatan ulama. Karena tanggungan utang yang ada adalah sudah tetap dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil sesuatu jaminan untuk utang tersebut
- c. *Rahn* yang terjadi sebelum munculnya hak

4. Sifat *Rahn*

Sifat *rahn* ada dua, yaitu sebagai berikut:

- a. *Rahn* bersifat mengikat bagi yang memberikannya saja. Maksudnya, dia tidak bisa dibatalkan. Sebab, dalam hal ini, dia bertindak untuk kemaslahatan orang lain sehingga ia mengikat bagi yang memberikannya
- b. *Rahn* tidak mengikat bagi yang memintanya. Sebab, dalam hal ini, dia bertindak untuk kemaslahatan diri sendiri. Karena, dia boleh membatalkannya³²

5. Manfaat *Rahn*

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *rahn* adalah sebagai berikut:

³² Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 109

- 1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- 2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (marhum) yang dipegang oleh bank.
- 3) Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu orang atau masyarakat yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.³³

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 130

6. Penerapan *Rahn* dalam Praktek Perbankan

Dalam praktek perbankan sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa akad *rahn* merupakan perjanjian *accessoir*, apabila debitur melunasi hutangnya yang timbul berdasarkan akad pembiayaan, maka akad pembiayaan menjadi berakhir, dan demi hukum, akad *rahn* sebagai akad ikutan (*accessoir*) menjadi berakhir pula.

Di samping akad *rahn* sebagai akad *accessoir* terhadap akad pembiayaan sebagai akad pokok, maka dalam praktek bank syari'ah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa ada juga *rahn* sebagai produk bank syari'ah. Dalam mekanisme akad *rahn* sebagai produk, nasabah memerlukan sejumlah uang dan bank syari'ah setuju memberikan pinjaman (*qard*). Atas pinjaman tersebut, nasabah memberikan barang yang digadaikan (*rahn*) kepada bank syari'ah sebagai agunan, yang lazimnya adalah barang bergerak, misalnya logam mulia berupa emas dan perhiasan. *Rahn* sebagai produk pendapatan bank syari'ah adalah berupa biaya administrasi dan asuransi serta *fee* (*ujrah*) untuk pemeliharaan barang yang digadaikan. Dalam praktek gadai emas, juga dapat dijadikan alternatif investasi, yaitu nasabah membeli emas dan digadaikan kepada bank

syari'ah (*rahn*) dan saat jatuh tempo gadai emas tersebut dijual, nasabah mendapatkan keuntungan dari selisih harga emas yang biasanya selalu meningkat.

7. Berakhir dan Selesainya Akad *Rahn*

Akad *rahn* selesai dan berakhir karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Diserahkannya *marhuun* kepada pemiliknya
- b. Terlunasi seluruh utang yang ada
- c. Penjualan *marhuun* secara paksa yang dilakukan oleh *rahn* atas perintah hakim, atau yang dilakukan hakim ketika *rahin* menolak untuk menjual *marhuun*. Apabila *marhuun* dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad *rahn* selesai dan berakhir.
- d. Terbebaskannya *rahin* dari utang yang ada atau dengan cara apa pun, walaupun dengan akad *hawalah* (maksudnya *rahin* sebagai *muhiil* dan *murtahin* sebagai *muhaal*). Dan seandainya *murtahin* menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka *marhuun* dianggap telah tertebus.
- e. Pembatalan akad *rahn* dari pihak *murtahin* atau dengan kata lain, *murtahin* membatalkan akad *rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut

hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik *murtahin*, dan akad *rahn* bagi pihak *murtahin* sifatnya tidak mengikat. Namun akad *rahn* tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah pihak *rahn*, karena akad *rahn* bagi *rahin* sifatnya mengikat.

- f. Menurut ulama malikiyah, akad *rahn* batal apabila sebelum terjadi al-Qabdhu (diserahkannya al-*Marhuun* ke tangan al-*Murtahin*), *rahin* meninggal dunia atau jatuh pailit, atau para pihak yang berpiutang lainnya selain *Murtahin* menagih *rahin* untuk membayar utangnya kepada mereka, atau mereka melaporkan perkara *rahin* kepada hakim dan meminta agar hakim menerapkan status *al-hajru* (larangan mentasharufkan harta) atas diri *rahin*, atau *rahin* sakit atau gila yang keduanya tidak sembuh hingga ajal menjemput
- g. Binasanya al-*Marhuun*. Berdasarkan kesepakatan fuqaha, akad *rahn* batal dengan binasanya al-*Marhuun*, baik itu menurut jumhur ulama yang mengatakan bahwa al-*Marhuun* adalah barang amanat di tangan al-*Martahin* sehingga jika binasa, maka ia tidak menanggungnya kecuali jika ada

unsur pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran dari al- *Murtahin*

- h. Melakukan pentasharufan terhadap al-*Marhun* dengan meminjamkannya, menghibahkannya atau mensedekahkannya³⁴

8. Status dan Fungsi *Marhuun*

a. Status *Marhuun*

Ulama fikih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*Murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pembeli gadai (*Rahin*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah diakui oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadi utang. Para ulama menilai hal ini dimaksudkan karena

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 229

utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka diperbolehkan mengambil suatu sebagai jaminan. Hal itu menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang. Misalnya seorang berkata: “saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat madzhab Maliki dan Hanafi. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) dijualbelikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).³⁵

b. Fungsi *Marhuun*

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat tentang fungsi *Marhuun*, yaitu sebagai berikut:

1) Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama syafi'iyah bahwa yang mempunyai hak atas manfaat harta benda gadai (*Marhuun*) adalah pemberi gadai (*Rahin*)

³⁵ Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar AL-Fikr, 2002), juz VI. Cet. 4, h. 4231

walaupun *Marhuun* itu berada di bawah kekuasaan penerima gadai (*Murtahin*). *Marhun* itu hanya sebagai jaminan atas kepercayaan atas *Murtahin*. Kepemilikan *marhun* tetap melekat pada *Rahin*. Oleh karena itu, fungsi atau hasil dari *Marhun* itu diserahkan kepada *Murtahin*. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan *Marhun* oleh *Murtahin* yang mengakibatkan turun kualitas *Marhun* tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh *Rahin*.³⁶

2) Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penerima harta benda gadai (*Murtahin*) hanya dapat memanfaatkan harta benda gadai atas izin dari pemberi gadai dengan persyaratan, sebagai berikut:

- a) Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena menghutangkan. Hal itu terjadi seperti orang menjual barang dengan harta tangguh, kemudian orang itu meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini diperbolehkan

³⁶ Chuzaimah T Yanggo dan Hafis Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi ke-3, (Jakarta: LSIK, 1997), h. 333

- b) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadai dikhususkan pada dirinya
- c) Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila telah ditentukan batas waktunya maka menjadi batal³⁷

3) Pendapat Ulama Hanabilah

Menurut pendapat ulama hanabilah, persyaratan bagi *murtahin* untuk mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah:

- a) Ada izin dari pemilik barang
- b) Adanya gadai bukan karena memberi utang

Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperas dan tidak dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*. Akan tetapi, apabila harta benda gadai itu berupa rumah, sawah, kebun, dan sejenisnya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya.³⁸

³⁷ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, edisi 1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 70

³⁸ Chuzaimah T Yanggo dan Hafis Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi ke-3, (Jakarta: LSIK, 1997), h. 75

4) Pendapat Ulama Hanafiyah

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfaatan barang gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (*Murtahin*) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (*Rahin*).

Menurut Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun izin dengan orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan harta benda gadai tidak berubahnya *qirad*, dan setiap bentuk *qirad* yang mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan berupa hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfatkannya.

Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan di atas, mempunyai dasar hukum

yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, penulis mempunyai pendapat yang lain, tetapi menjadikan dasar hukum, yaitu fungsi dari barang gadai (*Marhun*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*Murtahin*). Namun *Rahin* bila ingin memanfaatkan *Marhun* harus izin dengan *Marhun*. Hal itu berarti kekuasaan pemanfaatan *Marhun* berada pada *Murtahin* selama utang *Rahin* belum dilunasi kepada *Murtahin*.³⁹

³⁹ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, edisi 1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 76

BAB III

PERJANJIAN KREDIT DI BMT SM NU AL-AMANAH TARUB TEGAL

A. Profil Tentang Kantor BMT SM NU Al-Amanah Tarub Tegal

1. Berdirinya BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal

BMT NU Al-Amanah Tarub bertempat di Jalan Raya Karangjati No. 25 Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, menempati tempat yang strategis dan mudah dijangkau dan tempat di tengah-tengah keramaian yaitu disebelah utara pasar Balamoa dan berada di lingkungan Yayasan Hasyim Asy'ari.

Berdiri dan mulai beroperasi tanggal 14 Mei 2004 sampai saat ini. Anggota mayoritas mempunyai usaha skala kecil menengah di bidang perdagangan, pertanian, pertukangan, perbengkelan, dan lain-lain.

BMT NU Al-Amanah Kecamatan Tarub merupakan unit usaha simpan pinjam dan perdagangan sector riil yang berada di bawah naungan Departemen Koperasi serta Binaan dari Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) Kabupaten Tegal. Lembaga yang didirikan dengan Badan Hukum (BH) No.BH 790/PAD/294/2007 bertujuan untuk berperan dalam rangka membangun dan mengembangkan

perekonomian dan struktur masyarakat Islam yang adil, makmur berdasarkan syari'at dan ridha Allah SWT.

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang didirikan oleh Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kecamatan Tarub ini berkonsentrasi pada investasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil yang berdasarkan prinsip syari'ah dan koperasi. Untuk mengawal tujuan tersebut dalam operasionalnya, BMT NU Al-Amanah berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 serta syari'at Islam, keimanan, dan ketaqwaan. Selain itu BMT NU Al-Amanah juga memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota
 - b. Kebersamaan/ukhuwah Islamiyah
 - c. Mandiri, swadaya, dan musyawarah
 - d. Semangat jihad, istiqamah, dan profesional¹
2. Visi, Misi, Fungsi, dan Tujuan
- a. Visi BMT NU Al-Amanah Tarub adalah meningkatkan kualitas ibadah anggota sehingga mampu sebagai khalifah Allah diatas bumi ini.
 - b. Misi BMT NU Al-Amanah Tarub yaitu:
 - 1) menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam kegiatan ekonomi memperdayakan pengusaha kecil dan

¹ Dokumentasi BMT SM NU Al-Amanah Tarub Tegal yang dikutip pada tanggal 11 Februari 2016

membina kepedulian *aghniya* dan *dhuafa* secara terpadu dan berkesinambungan

- 2) membangun citra sebagai Lembaga Keuangan milik masyarakat yang berkembang dengan sehat, ramah dan dipercaya sebagai mitra bisnis
- 3) mengintegrasikan manajemen kelembagaan sehingga mampu memberikan layanan standar kepada anggota
- 4) mengembangkan SDM profesional yang terampil, jujur, dan ramah
- 5) membangun jaringan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat sistem pelayanan yang aman

3. Fungsi

- a. Mempertinggi kualitas SDM anggota menjadi profesional sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah serta menghadapi tantangan global.
- b. Mengorganisasi dana sehingga berkembang dan berputar di masyarakat lapis bawah, mengembangkan kesempatan kerja dan ikut menata program pembangunan serta memperkokoh usaha anggota.

4. Tujuan BMT NU Al-Amanah Tarub

- a. Tujuan Umum BMT yaitu:
 - 1) Menggali potensi swadaya ekonomi masyarakat dengan membangun kewiraswastaan sumber daya manusia di masyarakat serta pengusaha

simpatik melalui lembaga usaha profit yang profesional dan berorientasi pada umat

- 2) Membangun dan mengembangkan jaringan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia yang mengakar, terstruktur, sistematis serta berkesinambungan

b. Tujuan khusus BMT adalah

- 1) Perspektif keuangan

Terwujudnya tanggung jawab dan target ekonomi BMT melalui penerapan pengetahuan yang dikuasai personal

- 2) Perspektif *Customer*

Terwujudnya tanggung jawab sosial ekonomi sehingga BMT dikenal secara luas sebagai Lembaga yang akrab dengan masyarakat dan lingkungannya

- 3) Perspektif Bisnis

Terwujudnya pelipatgandaan kinerja seluruh personal dan perusahaan melalui implementasi *open book management* dan integrasi proses bisnis

- 4) Perspektif pembelanjaan dan kebutuhan

Terwujudnya keunggulan jangka panjang perusahaan di lingkungan bisnis global melalui pengembangan dan pemfokusan SDM

5. Strategi dan Kebijakan

- a. BMT NU Al-Amanah Tarub memiliki sistem pembukuan sesuai dengan kaidah akuntansi Indonesia maupun sistem akuntansi koperasi (PSAK) No. 27 sehingga mampu memberikan gambaran yang transparan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- b. BMT NU Al Amanah Tarub mempunyai kepengurusan yang cukup kompeten dalam mengembangkan semua aktivitas usaha koperasi.
- c. Mempertahankan struktur modal yang mampu mengemban fungsi organisasi dengan baik.²

6. Bidang Usaha

Bidang usaha yang sudah dijalani atau sudah berjalan dilingkungan BMT NU Al-Amanah Tarub adalah:

- a. Bidang simpan pola syari'ah
- b. Pertokoan meliputi toko yang ada di masing-masing lembaga pendidikan Hasyim Asy'ari Tarub yaitu SMA, SMK, SMP, dan MTs NU 01 Hasyim Asy'ari Tarub

² Dokumentasi BMT SM NU Al-Amanh Tarub Tegal yang dikutip pada tanggal 11 Februari 2016

- c. TPKU (Tempat Praktek Keterampilan Usaha),
perbengkelan sepeda motor, program ini merupakan
bantuan dari Menteri Negeri UKM dan Koperasi.³

7. Pengurus dan Pengelola BMT NU Al-Amanah

Untuk merealisasikan programnya, BMT NU Al-Amanah menunjuk beberapa orang untuk menjadi pengurus dan pengelolanya. Dalam kepengurusan dan pengelolaan BMT NU Al-Amanah Tarub terdapat 3 (tiga) dewan dan satu pengelola dalam BMT NU Al-Amanah dengan klasifikasi tugas yang berbeda antar pengurus dan pengelola. Berikut ini adalah struktur pengurus dan pengelola BMT NU Al-Amanah Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal:

a. Dewan Pengurus

- 1) Ketua : Drs. H. Farikhi, MM
- 2) Wakil Ketua : Drs. H. Bambang Ar,
- 3) Sekretaris : 1. Drs. H. Makmun Mukhtar
2. M. Munip
- 4) Bendahara : Hj. Jumatul Aliyah, SE
- 5) Pembantu Umum: Mahmudin, S.Pd

b. Dewan Pengawas Manejemen

- 1) Drs. Saekhun
- 2) Drs. Jaelani
- 3) Drs. H. M. Sholeh

³ Observasi di BMT SM NU Al-Amanah pada tanggal 11 Februari 2016 dan wawancara dengan Bapak H. Muhsin, S.HI selaku maneger dan Ibu Inka Tri Dewi K selaku kasir pada tanggal 11 Februari 2016

c. Dewan Pengawas Syariah

- 1) KH. Sofiudin, A.Ma
- 2) KH. Khuzaeni Amir
- 3) Imam turmudzi, S.Ag

d. Pengelola

- 1) Manager : H. Muhsin, S.HI
- 2) Kabag Keuangan : Khaerul Amin, A.Md
- 3) Kabag pembiayaan : Rizki Munaji
- 4) Operator : 1. Evane Wiwi Saputri, S.Pd
2. Sri Atun, S.Pd
- 5) Pembuku : S. Mualifah
- 6) Kasir : 1. Inka Tri Dewi A
2. Cholipah
- 7) Supervisor : Heri Suparjo
- 8) Marketing : 1. Akhmad Puji F
2. Aji Rokhmatuloh
3. Lutfiatussarofah
4. Tri Yuni Sulistiyani, S. Pd
5. Azinta Putri CN
6. Devi Lestari
7. Siti Umrotun
8. Mahdalena
9. Retno Nur Hesti
10. Titin Supriatin, S.Pd⁴

⁴ Observasi di BMT SM NU Al-Amanah pada Tanggal 11 Februari 2016 dan dokumentasi BMT SM NU Al-Amanah Tarub Tegal yang dikutip pada tanggal 11 Februari 2016

B. Syarat-syarat Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Muhsin, S. HI selaku manajer dan ibu Cholipah selaku kasir, tujuan dari perjanjian pemberian kredit yang dilakukan oleh BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat
- b. Untuk memberikan modal bagi perkembangan usaha makro dan mikro
- c. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan dari pemberian kredit tersebut

Pemberian kredit sendiri adalah suatu kegiatan usaha yang sah bagi BMT NU Al-Amanah. Jenis BMT tersebut merupakan badan usaha penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pemberian kredit, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban seorang nasabah
- b. Aplikasi permohonan pembiayaan
- c. Perjanjian kredit
- d. Pengakuan hutang
- e. Pemberian jaminan
- f. Pernyataan kesanggupan pembayaran

Proses perjanjian kredit dengan pembebanan hak tanggungan di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal, yaitu sebagai berikut:

1. Proses perjanjian kredit dimulai sejak diterimanya permohonan nasabah kepada pihak BMT sampai dengan pencairan kredit kepada nasabah, permohonan tersebut yaitu:
 - a. Data personal
 - b. Status tempat tinggal
 - c. Tujuan penggunaan
 - d. Penghasilan usaha/pekerjaan
 - e. Pernah/belum pernah mengajukan pembiayaan di BMT dan tempat lain
 - f. Rencana pembiayaan
 - g. Kebutuhan modal
 - h. Ketersediaan survei
 - i. Analisa pembiayaan *account officer*

Pelaksanaan proses perjanjian kredit oleh pihak BMT dilakukan menurut jenis kredit yang diminta dan jenis jaminan yang diberikan debitur. Secara umum perjanjian kredit dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Permohonan kredit

Permohonan kredit dari nasabah secara tertulis dalam suatu aplikasi permohonan kredit. Bentuk dari aplikasi ini merupakan aplikasi yang telah disediakan oleh BMT, yaitu sebagai berikut:

- 1) Identitas calon debitur, yaitu: nama pemohon, nama suami/istri, tempat tanggal lahir pemohon, jumlah anggota keluarga, alamat, fotocopy KTP pemohon, fotocopy suami/istri, fotocopy kartu keluarga.
 - 2) Identitas usaha, yaitu: jenis usaha/ pekerjaan, tempat usaha/pekerjaan, lama usaha/pekerjaan, penghasilan usaha/pekerjaan, surat ijin usaha/SIUP DAN NPWP.
 - 3) Pernah/belum pernah mengajukan kredit di BMT dan tempat lain.
 - 4) Rencana pembiayaan, yaitu: jumlah yang diajukan, jangka waktu, bagi hasil.
 - 5) Kebutuhan modal, yaitu: modal sendiri, modal tambahan, total kebutuhan modal.
 - 6) Ketersediaan survei, yaitu: hari dan tanggal sampai dengan, jam, tempat.
 - 7) Jenis jaminan dan fotocopy surat bukti hak milik atas jaminan.
- b. Analisis kredit setelah permohonan kredit tersebut diajukan, maka bagian kredit (*Account Officer*) menganalisis dana. Analisis kredit yang dilakukan menyangkut segala hal yang tercantum dalam aplikasi

permohonan yang telah diajukan. Hasil analisis kredit diajukan pada manager dan pengurus BMT.

- c. Keputusan kredit hasil dari analisis kredit yang dilakukan oleh bagian kredit diserahkan kepada pejabat pemutus, yaitu manager dan pengurus yang mempunyai wewenang pemberian fasilitas kredit. Pemutus dapat menerima atau menolak permohonan kredit yang diajukan nasabah.
- d. Penolakan yaitu keputusan penolakan permohonan kredit diberikan pada pemohon yang secara teknis dianggap tidak memenuhi syarat. Keputusan penolakan disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan.
- e. Persetujuan yaitu pihak BMT menerima atau menyetujui permohonan kredit dari calon debitur, pemutus menyampaikan persetujuan permohonan persetujuan permohonan kredit ini pihak BMT dapat mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur secara tertulis.

2. Pembuatan perjanjian kredit

Setelah menandatangani surat persetujuan permohonan kredit debitur kemudian menghadap ke bagian administrasi kredit untuk membuat perjanjian kredit. Perjanjian kredit dilakukan secara dibawah tangan,

pengertian perjanjian kredit di bawah tangan yaitu para pihak debitur menghadap kepada pihak BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal dengan mengisi formulir permohonan kredit tersebut yang hanya kesepakatan berapa besar modal dana yang akan dipinjam debitur dalam perjanjian kredit tersebut serta perjanjian tersebut tanpa disahkan oleh petugas berwenang.

Perjanjian kredit yang telah ditandatangani para pihak berfungsi sebagai perjanjian pokok. Perjanjian pokok adalah perjanjian yang mendasari di buatnya perjanjian lain. Karena setelah perjanjian kredit dibuat, perjanjian pengikat jaminan sebagai perjanjian hutang. Perjanjian tersebut dapat berupa pengikat hak tanggungan atau jaminan.

Dalam pelaksanaan permohonan kredit sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak H. Muhsin, S. HI sebagai manager BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal, menurut keterangan BMT NU Al-Amanah pada dasarnya pihak BMT ingin memperoleh dan mengefisiensikan proses permohonan pemberian kredit bagi nasabah debitur, yang senantiasa berusaha menerapkan kelima tahapan secara urut dan runtut dan sesuai dengan SK dari BMT.

3. Setelah perjanjian di bawah tangan sudah dinyatakan sah oleh pihak BMT maka debitur menandatangani perjanjian

kredit dengan jaminan hak tanggungan yang nantinya akan disahkan oleh petugas yang berwenang.⁵

C. Praktek Jaminan dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal.

Dalam suatu perjanjian pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan khususnya di BMT NU Al-Amanah pada dasarnya memang didasarkan pada syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari kesepakatan, kecakapan, suatu sebab yang halal dan juga kehati-hatian dari suatu pemberian kredit, tetapi itu semua juga tidak memberikan jaminan dan juga tidak bisa memungkiri bahwa nasabah dan debitur tidak akan melakukan pemenuhan prestasinya terhadap kreditur atau dengan kata lain melakukan wanprestasi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Muhsin, S. HI selaku manager, apabila nasabah debitur penerima kredit melakukan wanprestasi, maka langkah proses yang dilakukan oleh BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal yaitu dalam mengambil tindakan penyelesaian didahulukan mencari adanya itikad tidak baik. Itikad tidak baik yaitu seorang debitur memang sengaja atau secara terbukti tidak mengangsur atas memenuhi

⁵ Dokumentasi BMT SM NU Al-Amanah yang dikutip pada tanggal 11 Februari 2016 dan wawancara dengan Bapak H. Muhsin, S.HI selaku maneger dan Ibu Cholipah selaku kasir pada tanggal 11 Februari 2016

prestasinya kepada kreditur atas hutang-hutangnya yang dikarenakan beberapa hal seperti:

- a. Karena memang debitur itu usahanya bangkrut.
- b. Melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu.
- c. Membayar hutang tidak sesuai dengan seharusnya yang harus di bayar.
- d. Karena tidak punya uang untuk mengangsur dikarenakan dalam keluarga itu terjadi krisis.

Solusi yang dilakukan BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal, yaitu sebagai berikut:

- a. Karena memang debitur usahanya bangkrut, maka solusinya pihak BMT akan melakukan pemberitahuan agar si debitur melunasi tunggakannya baik dengan caranya sendiri atau dengan di ambil alih oleh pihak BMT dengan cara mengambil atau melelang usaha tersebut dan sisa hasil dari pelelangan akan digunakan untuk menutupi tunggakan si debitur kepada kreditur dan sisa hasil dari pelelangan tersebut akan dikembalikan ke debitur dan hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 4 perjanjian kredit BMT NU Al-Amanah No: 790/PDA/294/2007.
- b. Melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu maka solusi yang di lakukan pihak BMT yaitu hanya melakukan pemberian denda kepada debitur atas ketidaktepatan waktu dalam membayar tunggakannya dan hal ini didasarkan

pada pasal 3 perjanjian kredit BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal No: 790/PDA/294/2007. Tahap wanprestasi dimana pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman sesuai waktu yang ditentukan maka pihak BMT NU Al-Amanah akan memberikan waktu selama satu bulan mulai tanggal pelunasan bagi debitur untuk melunasi hutangnya. Apabila sampai batas waktu yang diberikan habis debitur belum juga memenuhi kewajiban maka pihak BMT NU Al-Amanah berhak menarik jaminan dengan surat penarikan jaminan.

- c. Membayar hutang tetapi tidak sesuai dengan seharusnya yang harus dibayar maka solusi yang di ambil oleh pihak BMT yaitu pihak BMT akan memberi toleransi kepada debitur untuk tetap melunasi tunggakannya dengan di kenakan denda yang didasarkan pada ketentuan pasal 3 perjanjian kredit BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal No: 790/PDA/294/2007. Apabila nasabah belum mampu maka benda jaminan yang berupa hak tanggungan akan dilelang oleh pihak BMT untuk melunasi tunggakan tersebut. Sedangkan wanprestasi yang terjadi karena adanya ketidakmampuan diluar kekuasaan nasabah maka pihak BMT memberikan kelonggaran bagi nasabah untuk menunda pembayaran maupun memperpanjang waktu pelunasan, tetapi dalam hal ini tentu saja diikuti oleh suatu

sanksi yang harus diterima oleh nasabah yang berupa denda keterlambatan.

- d. Karena tidak punya uang untuk mengangsur maka solusinya yaitu pihak BMT akan menggunakan jaminan dari debitur yang jaminannya berupa hak tanggungan untuk melunasi tunggaknya dengan cara BMT akan melelang atau menjual barang tersebut dan sisa hasil pelelangan akan dikembalikan kepada debitur yang didasarkan atas ketentuan pasal 4 perjanjian kredit BMT NU Al-Amanah No: 790/PDA/294/2007.⁶

⁶ Dokumentasi BMT SM NU Al-Amanah yang dikutip pada tanggal 11 Februari 2016 dan wawancara dengan Bapak H. Muhsin, S.HI selaku maneger pada tanggal 10 Maret 2016

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JAMINAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI BMT SM
NU AL-AMANAH TARUB TEGAL**

A. Akad Perjanjian Kredit

Sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa praktek jaminan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh nasabah yang terjadi karena adanya suatu keinginan yang sangat di idamkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena tidak mungkin untuk meminjam uang kepada orang lain dalam jumlah yang cukup besar maka nasabah terpaksa melakukan suatu kredit pada suatu BMT yang menjadikan jaminan sebagai upaya untuk memenuhi keinginan. Hal ini terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak pada waktu pelaksanaan perjanjian kredit.

1. Analisis Penerapan Jaminan dalam Perjanjian Kredit

Pada dasarnya ijab qabul harus dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak memungkinkan karena bisu, maka boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung ijab qabul.¹ Dalam penerapan perjanjian kredit yang dilakukan di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal, ijab qabul dilakukan

¹ Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 30

dengan surat menyurat yaitu dengan adanya perjanjian al-qard. Adapun jenis perjanjian kredit yang dilakukan yaitu perjanjian kredit harian/mingguan/bulanan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mana dalam perjanjian tersebut secara singkat terdapat data pribadi dari kedua belah pihak, pembayaran kredit, jangka waktu kredit, jumlah kredit yang disetujui, peristiwa cidera janji, jaminan yang dijamin, serta bagi hasil yang disepakati antara anggota dengan pihak BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal.

Dalam perjanjian kredit selain ada perjanjian al-*qard* ada perjanjian ikatan yang dilakukan antara anggota dengan BMT yaitu perjanjian pengikat jaminan. Pengikat jaminan yaitu untuk perjanjian antara debitur dengan kreditur, agar debitur menyerahkan jaminan atas diterimanya kredit sedangkan kreditur melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian yang berlaku antara kedua belah pihak. Suatu jenis pembiayaan hendaknya dapat diikat secara sempurna agar dapat melindungi kepentingan BMT.

Dalam menentukan barang jaminan untuk mendapatkan kredit, BMT NU Al-Amanah menentukan penentuan barang jaminan pada analisa kredit berdasarkan dari 5 C yaitu:

a. *Character* (kepribadian, watak)

Character adalah sifat atau watak seseorang nasabah pengambil pinjaman. Tujuannya adalah untuk

memberikan keyakinan kepada BMT bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dipercaya.

Character merupakan ukuran untuk menilai “kemauan nasabah/anggota membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

b. *Capacity* (kemampuan)

Capacity yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. *Capacity* untuk melihat kemampuan calon nasabah/anggota dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital* (modal)

Capital adalah modal usaha dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Jika terlihat baik maka BMT dapat memberikan kredit kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkan

d. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat digunakan sebagai pengganti pembayaran apabila peminjam tidak dapat meneruskan angsuran kepada BMT. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung BMT dari resiko kerugian.

e. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, jika kurang baik, permohonan kreditnya akan ditolak²

Prosedur pengikat jaminan yang dilakukan oleh BMT NU Al-Amanah, yaitu sebagai berikut:

- a. Agunan berupa tanah bersertifikat hak milik, dengan nominal pembiayaan diatas kewenangan harus dipasang Hak Tanggungan (APHT).

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKN, 2002), h. 261

- b. Agunan berupa benda bergerak (kendaraan bermotor, alat berat, dan lain-lain) dengan nominal pembiayaan diatas kewenangan harus *difidusia*.
- c. Agunan yang tidak diikat dengan APHT maupun *fidusia*, pengikatan dilakukan dengan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) ditambah pengikat agunan bawah tangan (surat kuasa jual dan surat lain misal, dengan mempunyai kekuatan pembuktian dan atau mendukung penerapan eksekusi atas barang agunan).

Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah yaitu sejak tidak ditepatinya atau dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut sudah tidak mampu atau tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya. Dalam hal tersebut permasalahan yang timbul dalam praktek BMT maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. Secara garis besar upaya penyelesaian dan penanganan dari BMT NU Al-Amanah dengan adanya permasalahan tersebut yaitu, penyelesaian pembiayaan cenderung fokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali kredit dengan cara menyita barang-barang jaminan kapanpun, dimanapun,

dan siapapun atas kepemilikan barang-barang jaminan tersebut.³

Jaminan yang dijaminkan nasabah kepada pihak BMT dapat dilakukan penyitaan. Penyitaan jaminan tergantung kebijakan manajemen. Kebijakan manajemen dari BMT NU Al-Amanah untuk menangani masalah ini yaitu dengan melakukan menyita barang-barang jaminan kapanpun, dimanapun, dan siapapun atas kepemilikan barang-barang jaminan tersebut.

BMT NU Al-Amanah melakukan lelang dengan cara menjual barang jaminan sesuai dengan harga pasar dengan broker yang sudah bekerjasama dalam hal pembelian barang-barang jaminan. Apabila sudah ditemukan pembeli barang jaminan dengan harga yang bisa menutup semua hutang anggota, maka hasil penjualan yang digunakan untuk menutupi angsuran jika masih terdapat kelebihan/sisa akan diberikan kepada anggota.

Dengan penyerahan barang jaminan dari anggota dan atau pemilik jaminan kepada BMT NU Al-Amanah telah selesai atau lunas dengan dikeluarkannya surat keterangan lunas oleh pihak BMT NU Al-Amanah. Apabila

³ Wawancara dengan Bapak H. Muhsin, S. HI selaku Maneger di BMT SM NU Al-amanah pada tanggal 11 Februari 2016

nilai hasil jual beli jaminan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada debitur atau anggota.

Jaminan kredit yang diberikan anggota kepada pihak BMT hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Jaminan dilakukan hanya untuk menutupi angsuran dari pihak *musytari* yang disebabkan karena tidak dapat menyelesaikan angsuran/hutangnya kepada *ba'i*, maka jaminan itu dapat menutup pinjaman yang kreditur berikan.

Proses penyitaan yang dilakukan apabila anggota sudah benar-benar tidak mampu membayar atau tidak punya itikad baik maka pihak BMT NU Al-Amanah bisa melakukan penyitaan terhadap jaminan yang telah dilakukan pengikatan terhadap barang jaminan dihadapan Notaris, selanjutnya pihak BMT NU Al-Amanah bisa melakukan pelelangan barang jaminan melalui broker untuk membeli barang jaminan milik anggota yang bermasalah dengan harga sesuai harga pasar serta berdasarkan kesepakatan dengan anggota dan atau pemilik barang jaminan.

Pada dasarnya pemberian jaminan dalam pembiayaan tidaklah wajib. Namun agar pihak pengguna dana memenuhi kewajibannya, pihak BMT dapat meminta untuk ditetapkan suatu jaminan tertentu dalam perjanjian

kredit. Kredit yang dilakukan di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal menggunakan kredit dengan skema Syari'ah, namun khusus untuk perjanjian pengikatan jaminan masih tetap tunduk dan menggunakan seluruh ketentuan hukum jaminan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu ketentuan hukum jaminan yang digunakan dalam penyaluran kredit secara konvensional, juga berlaku bagi kredit dengan menggunakan skema syariah yang ada di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal.

2. Aplikasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal

Mekanisme perjanjian kredit dengan jaminan di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal, disajikan pada bagian ini dengan menjelaskan latar belakang pemakaian perjanjian kredit, mendeskripsikan proses pengajuan kredit, praktik kredit dan mekanisme perjanjian kredit dengan jaminan di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal.

a. Proses pengajuan kredit

1) *Flow Chart* (Tata Cara) pengajuan kredit di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal

- a) Calon nasabah datang ke kantor untuk mengajukan kredit menemui *customer service* dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan beserta syaratnya, jika nasabah belum

membawa syarat-syarat kredit, maka nasabah harus kembali lagi besok serta membawa syarat-syarat kredit.

- b) Jika nasabah sudah membawa syarat-syarat pembiayaan maka *customer service* menyerahkan formulir pengajuan kredit kepada *account officer* untuk dipelajari.
- c) Kemudian *account officer* mensurvey keadaan calon nasabah.
- d) *Account officer* datang dan melaporkan hasil survey atau melakukan komite dengan pimpinan yang dihadiri oleh *account officer* atau manager.
- e) Nasabah akan dihubungi untuk diberitahu hasil komite.
- f) Jika pengajuan kredit ditolak maka pihak BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal tidak perlu mengemukakan alasan kenapa menolak pengajuan kredit, karena hal ini sudah tercantum dalam formulir yang telah diajukan oleh nasabah.
- g) Jika pengajuan kredit diterima maka *customer service* menghubungi calon nasabah untuk

membuat akad kredit dan menyerahkan kepada kasir.

- h) Setelah diperiksa, kasir memberikan akad tersebut kepada manager.
- i) Calon nasabah datang menemui manager untuk menandatangani akad kredit sekaligus pencairan kredit.⁴

2) Penentuan pemberian kredit

- a) Calon nasabah harus memiliki jaminan yang sudah ditentukan oleh BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal. Jika jaminan sudah lengkap sesuai persyaratan maka jumlah kredit yang diajukan oleh calon nasabah akan disetujui sesuai dengan jumlah yang diajukan, akan tetapi jika persyaratan jaminan yang diberikan kurang lengkap maka jumlah kredit yang diajukan disetujui akan tetapi kurang dari nominal yang diajukan dan bisa juga pengajuan kredit ditolak oleh BMT NU Al-Amanah.
- b) Calon nasabah baik nasabah baru ataupun nasabah lama harus melengkapi persyaratan administrasi yang meliputi:

⁴ Wawancara dengan Bapak H. Muhsin, S.Hi sebagai Manager di BMT SM NU Al-Amanah Tarub Tegal pada tanggal 11 Februari 2016

- 1) Fotocopi KTP
- 2) Fotocopi KTP suami/istri, jika calon nasabah belum berkeluarga maka yang menjadi penjamin adalah keluarga atau teman.
- 3) Fotocopi Kartu Keluarga
- 4) Fotocopi Ijin Usaha/SIUP dan NPWP
- 5) Fotocopi Surat Bukti Hak Milik atas Jaminan⁵

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kredit

1. Analisis Penerapan Jaminan *Fidusia* dalam Perjanjian Kredit dalam Pandangan Hukum Islam

Perjanjian kredit yang dilakukan oleh BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal terjadi setelah adanya kesepakatan antara BMT dan anggota yang diikat dalam sebuah perjanjian kredit. Selain perjanjian kredit ada perjanjian tambahan yaitu perjanjian pengikat jaminan yang di sini dilakukan secara *fidusia*.

Dalam *fidusia* telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fidusiar* atau kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada

⁵ Dokumentasi BMT SM NU Al-Amanah Tarub Tegal yang dikutip pada tanggal 11 Februari 2016

penerima *fidusia* adalah hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminkan beralih kepada penerima *fidusia*. Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijadikan tersebut berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.⁶

Dengan adanya penyerahan hak kepemilikan atas kebendaan jaminan *fidusia* ini, tidak berarti bahwa penerima dari jaminan *fidusia* akan benar-benar menjadi pemilik kebendaan yang dijadikan dengan *fidusia* tersebut. Namun hanya kepemilikan sementara selama pemberi *fidusia* masih mempunyai kewajiban kepada penerima *fidusia*.

Dalam kedudukan sebagai penerima *fidusia*, maka penerima *fidusia* mempunyai hak untuk menjual kebendaan *fidusia* yang dijaminkan kepadanya “seolah-olah” BMT menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan dimaksud, bila pemberi *fidusia* wanprestasi.

Dengan kata lain selama pemberi *fidusia* belum melunasi utangnya, maka selama itu penerima *fidusia* mempunyai hak untuk menjual kebendaan *fidusia* yang dijaminkan kepadanya. Artinya, bila kewajiban atau utang pemberi *fidusia* lunas, maka kebendaan *fidusia* yang dijaminkan kepadanya akan diserahkan kembali kepadanya oleh penerima *fidusia*.

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 284

Jaminan atau gadai dalam Islam dikenal dengan *rahn*. Para ulama mendefinisikan *rahn* adalah penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'ah sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.

Mengenai *rahn* yang telah ditetapkan dalam Islam, ada dua syarat yang disebutkan, yaitu syarat sah dan syarat kerusakan

a. Syarat sah

Syarat sah yaitu mengenai penguasaan atas barang yang digadaikan yaitu adanya penyerahan barang sebagai jaminan atas pelunasan utang, ini berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya., dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan

Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah:283)⁷

b. Syarat kerusakan

Syarat yang dapat membatalkan *rahn* yaitu apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat bahwa nasabah akan membawa haknya pada masanya, dan jika tidak, maka barang tersebut menjadi milik penerima gadai. *Fuqaha* telah sependapat bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai.

Para ulama sepakat bahwa barang agunan (jaminan) itu hak kepemilikannya tetap berada ditangan pemiliknya, yang beralih hanyalah penguasaannya, walaupun tidak dapat ditebus pada saat jatuh tempo.⁸

Pada zaman jahiliyah, jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar utang pada waktunya, maka barang gadainya lepas dari pemiliknya dan menjadi hak milik penggadai. Tetapi kemudian Islam melarang praktek gadai semacam ini.⁹

Dalam jaminan *fidusia* terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 128

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7* (Pustaka Rizki Putra, 2001) hal 135

⁹ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994) h. 126

dilakukan atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya diserahkan dan dipindahkan kepada kreditor penerima *fidusia* adalah hak kepemilikannya atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminakan beralih kepada kreditor penerima *fidusia*. Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminakan berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.

Sedangkan dalam *rahn*, barang jaminan tidak dibicarakan sebagai sesuatu yang akan lepas dari tangan pemilik bila penerima hutang tidak dapat melunasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Para ulama sepakat bahwa barang agunan itu hak kepemilikannya tetap berada ditangan pemiliknya, yang beralih hanyalah penguasaannya, walaupun tidak dapat ditebus pada saat jatuh tempo. Dan apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat bahwa ia akan membawa haknya pada masanya, dan jika tidak, maka barang tersebut menjadi milik penerima gadai. Fuqaha sependapat bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai.

Persamaan dan perbedaan antara jaminan *fidusia* dengan jaminan dalam konsep Islam (*rahn*)

a. Persamaan

- 1) Dari segi keberadaan jaminan hutang baik jaminan *fidusia* dan *rahn* mensyaratkan adanya barang yang dapat dijadikan jaminan atas pelunasan utang.
- 2) Dari segi maksud adanya jaminan barang baik jaminan *fidusia* maupun *rahn* jaminan dimaksudkan untuk berjaga-jaga atau cadangan bagi pelunasan manakala pengguna dana tidak dapat membayar utang pada waktunya

b. Perbedaan

- 1) Dalam jaminan *fidusia* pengguna dana menyatakan melepas wewenang atas barang miliknya yang dijadikan jaminan utang bila pada waktunya ia tidak dapat melunasi utangnya, sedangkan dalam *rahn* pernyataan semacam itu tidak ada bahkan para ulama sepakat pernyataan tersebut dapat membatalkan akad *rahn*
- 2) Dalam *rahn* barang yang dijadikan jaminan pelunasan utang tidak beralih kepemilikannya hanya sebatas penahanan ditangan penerima gadai, sedangkan jaminan *fidusia* terjadi

pengalihan hak kepemilikan kepada penerima gadai.

Penerapan jaminan *fidusia* dalam perjanjian kredit terdapat kesepakatan bahwa pihak pengguna dana telah memberikan kuasa penuh dan menyerahkan hak kepemilikan kepada pihak BMT. Menurut para ulama kesepakatan dalam *rahn* yang mensyaratkan adanya pemindahan hak kepemilikan atas barang jaminan dari orang yang menggadaikan kepada penerima gadai merupakan salah satu syarat kerusakan *rahn* yang menyebabkan batalnya akad *rahn*. Maka dapat dikatakan bahwa pengikatan jaminan dalam jaminan *fidusia* ini dikatakan batal karena adanya syarat kerusakan yang dapat merusak atau membatalkan akad, begitu pula akad perjanjian kredit.

Apabila dilihat dari unsur tujuannya, perjanjian dalam jaminan tersebut adalah suatu bentuk pengamanan terhadap keberadaan benda yang menjadi jaminan. Dimana kepemilikan benda pindah ketangan penerima *fidusia* sedang keberadaan benda yang menjadi jaminan ada di tangan pemilik benda, memungkinkan adanya benda tersebut akan hilang, rusak maupun dibawa lari

pihak pengguna maka perlu adanya suatu bentuk ketetapan hukum yang mengatur terhadap benda tersebut. Kesepakatan jaminan *fidusia* mengakibatkan batalnya perjanjian pengikatan jaminan beserta perjanjian kredit, namun kesepakatan tersebut sebagai wujud pengamanan terhadap keberadaan benda yang dijadikan jaminan dan memberikan hak kepada pemilik benda untuk tetap menggunakan benda tersebut meskipun kepemilikan sudah berpindah tangan kepada penerima *fidusia*.

Apabila diartikan secara literatur, bahwa setiap perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat yang rusak maka perjanjian atau akad tersebut rusak dengan sendirinya. Begitu pula perjanjian kredit di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal yang di dalamnya terdapat perjanjian jaminan *fidusia* yang dianggap batal karena adanya syarat rusak di dalam akad tersebut, maka mengakibatkan perjanjian kredit juga rusak dengan sendirinya. Namun dalam bentuk apapun itu, secara faktanya perjanjian tersebut sangat memberi manfaat bagi pihak pengguna dana maupun pihak BMT.

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa BMTNU Al-Amanah tidak begitu memperhatikan apakah akad yang dipakai dalam pengikatan jaminan yang dilakukan BMT NU Al-Amanah hanya memperhatikan bagaimana dana yang tersalurkan kepada anggota aman dan dapat kembali dengan adanya pengikatan jaminan tersebut. Maka praktek pengikatan jaminan yang dilakukan BMT NU Al-Amanah dalam kredit tersebut dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan pengikatan jaminan kredit yang ada di bank konvensional. Oleh karena itu, BMT NU Al-Amanah harus lebih memperhatikan akad yang digunakan dalam pengikatan jaminan tersebut, mengingat hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad menjadi bagian pertama setiap transaksi ekonomi. Maka akad yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi hendaknya dibuat secara benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Karena dari akadlah semua dapat dikatakan sah atau tidak sah.

Mengenai pemanfaatan atas barang yang dijadikan jaminan sampai sekarang para ulama

masih berselisih pendapat mengenai pemanfaatan baik oleh pihak pegadaian maupun penerima gadai. Termasuk dalam pengikatan jaminan secara *fidusia* yang dilakukan oleh BMT, dimana pemanfaatan barang diberikan kepada pihak pemberi *fidusia* meskipun kepemilikan ada ditangan penerima *fidusia*. Namun pada kenyataannya pengikat jaminan dengan cara ini banyak memberikan manfaat bagi pihak anggota maupun pihak BMT.

2. Analisis Hukum Islam tentang Barang Jaminan

Barang yang dijadikan sebagai jaminan *fidusia* adalah benda yang bergerak, yang berwujud atau tidak berwujud sistem jaminan *fidusia* ini belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, karena pada masa Rasulullah barang jaminan tersebut harus diserahkan setelah pemilik barang menerima utang sedangkan pada jaminan *fidusia* ini yang dijadikan jaminan bukan barang/bendanya tetapi hanya hak kepemilikan saja. Barang yang dijadikan jaminan tidak ditarik/diambil apabila si debitur melakukan wanprestasi. Adapun hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامًا مِنْ حَدِيثِهِ.

“Aisyah r.a. berkata: bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi”.¹⁰

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَكَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه)

“Dari Anas, berkata: “Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutangi syair (gandum) dari seorang yahudi ini untuk keluarga beliau”. (HR Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah)¹¹

Dari praktek Nabi yang menjelaskan bahwa yang dijadikan sebagai barang jaminan termasuk barang bergerak yang berupa baju besi karena pada zaman Nabi baju besi mempunyai nilai yang sangat besar yaitu sebagai baju besi di medan pertempuran, maka boleh dijadikan sebagai jaminan hutang.

Keuntungan dan kerugian barang jaminan *fidusia*, bahwa dalam lembaga jaminan *fidusia* barang-barang yang dijadikan jaminan tetap berada dibawah penguasaan debitur/pemilik barang, artinya debitur masih boleh menggunakan barang-barang tersebut untuk melakukan kegiatan usahanya karena hak miliknya saja yang disimpan oleh kreditur selama hutangnya

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 129

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 255

belum lunas, itu berarti *fidusia* adalah penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sedang dalam hukum Islam, dalam hal gadai, bahwa gadai tetap berhak mengambil manfaat dari barangnya yang digadaikan, bahkan semua manfaatnya tetap milik debitur juga kerusakan atas barang gadainya menjadi tanggungannya, walaupun tidak seizin orang yang menerima gadai, tetapi usahanya untuk menghilangkan miliknya dari barang itu/mengurangnya tidak dibolehkan melainkan dengan izin yang menerima gadai. Maka tidaklah sah bagi orang yang menggadaikan/menjual barang yang telah digadaikan itu, begitu juga menyewakannya apabila masa sewa-menyewa itu melewati masa gadaian yang memegang gadai boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti kerugiannya untuk menjaga barang itu.

Barang yang dijadikan sebagai jaminan yang digunakan oleh BMT NU Al-Amanah sebagai agunan dalam perjanjian kredit, yaitu:

a. Jaminan BPKB

BPKB harus atas nama sendiri (istri/suami). Jika BPKB atas nama orang lain, maka wajib menyerahkan foto copy KTP pemilik BPKB, foto copy KK, surat kuasa bermaterai dan tanda tangan persetujuan atas peminjaman BPKB

b. Jaminan Sertifikat Hak Milik

Sertifikat Hak Milik harus atas nama sendiri (suami/istri). Jika Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain harus ada surat keterangan, dan pemilik sertifikat tersebut bersedia untuk menjaminkan sertifikat tanahnya dalam kredit yang disertai surat kuasa, dan harus menyertakan foto copy KTP pemilik, foto copy KK dan tanda tangan kesediaannya bertanggung jawab jika terjadi kredit macet.

Nilai *taksasi* adalah persentase tertentu yang digunakan untuk menetapkan harga yang dapat dipertimbangkan bagi sesuatu jenis jaminan pembiayaan berdasarkan harga pasar yang diperoleh dari penilaian ekonomis. Nilai *taksasi* yang digunakan oleh BMT NU Al-Amanah untuk tanah 70% dari besar nominal pembiayaan dan untuk kendaraan bermotor sebesar 50% dari besar nominal pembiayaan¹².

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Jaminan Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Jaminan terjadi karena para masalah ingin mencapai kemakmuran hidupnya dan semua itu membutuhkan dana yang sangat besar sehingga para nasabah harus melakukan kredit

¹² Wawancara dengan Bapak H. Muhsin, S.HI di BMT SM NU Al-Amanah pada tanggal 11 Februari 2016

melalui BMT dengan memberikan barang/benda sebagai jaminan tetapi dalam hal ini yang dijadikan jaminan adalah hak dari benda yang dijaminan hal ini dilakukan oleh pihak BMT karena pihak BMT khawatir para nasabah tidak mampu membayar hutang-hutangnya menurut hukum Islam pelaksanaan jaminan ini sama seperti pelaksanaan gadai pada umumnya tetapi yang dijadikan jaminan hanya hak kepemilikannya saja bukan benda secara fisiknya sedangkan menurut fatwa MUI penggunaan barang yang haknya dijadikan jaminan oleh pemilik barang tersebut dibolehkan atas izin pihak BMT pihak BMT dapat menarik benda yang haknya dijadikan jaminan sewaktu-waktu apabila debitur tidak mampu membayar hutangnya atau debitur melakukan wanprestasi.¹³

¹³ Wawancara dengan Bapak H. Muhsin, S.HI di BMT SM NU Al-Amanah pada tanggal 11 Februari 2016

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jaminan kredit yang diberikan anggota kepada pihak BMT hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Jaminan dilakukan hanya untuk menutupi angsuran dari pihak *musytari* yang disebabkan karena tidak dapat menyelesaikan angsuran/hutangnya kepada *ba'i*, maka jaminan itu dapat menutup pinjaman yang kreditur berikan. Proses penyitaan yang dilakukan apabila anggota sudah benar-benar tidak mampu membayar atau tidak punya itikad baik maka pihak BMT NU Al-Amanah bisa melakukan penyitaan terhadap jaminan yang telah dilakukan pengikatan terhadap barang jaminan dihadapan Notaris, selanjutnya pihak BMT NU Al-Amanah bisa melakukan pelelangan barang jaminan melalui broker untuk membeli barang jaminan milik anggota yang bermasalah dengan harga sesuai harga pasar serta berdasarkan kesepakatan dengan anggota dan atau pemilik barang jaminan
2. BMT NU Al-Amanah tidak begitu memperhatikan apakah akad yang dipakai dalam pengikatan jaminan yang dilakukan

hanya memperhatikan bagaimana dana yang tersalurkan kepada anggota aman dan dapat kembali dengan adanya pengikatan jaminan tersebut. Maka praktek pengikatan jaminan yang dilakukan BMT NU Al-Amanah dalam kredit tersebut sama dengan pengikatan jaminan kredit yang ada di bank konvensional, yaitu akad *rahn* sebagai produk, nasabah memerlukan sejumlah uang dan BMT setuju memberikan pinjaman (*qard*). Atas pinjaman tersebut, nasabah memberikan barang yang digadaikan (*rahn*) kepada bank syari'ah sebagai agunan. Selain itu pihak BMT harus memperoleh jaminan dari nasabah sebagai jaminan kredit yang diberikannya. Oleh karena itu, BMT lebih memperhatikan akad yang digunakan dalam pengikatan jaminan tersebut, mengingat hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad menjadi bagian pertama setiap transaksi ekonomi. Maka akad yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi hendaknya dibuat secara benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Karena dari akadlah semua dapat dikatakan sah atau tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan tugas akhir ini, ada beberapa saran untuk pihak BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal yang menjadi obyek dalam penulisan skripsi ini:

1. BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal perlu memperhatikan kepuasan nasabahnya. Kepuasan nasabah sangat penting untuk menjaga loyalitas nasabah karena dengan loyalitas yang dimiliki oleh nasabah.
2. Dalam operasionalnya BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal harus tetap berpegang pada prinsip syari'ah Islam baik untuk penyaluran dana maupun untuk penghimpunan dana, sehingga fungsi BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal sebagai lembaga keuangan syari'ah yang keberadaannya untuk ekonomi umat dapat tercapai.
3. Perbaiki suatu pernyataan “perjanjian kredit” yang tercantum dalam surat perjanjian diganti dengan “perjanjian pembiayaan” karena dalam suatu lembaga keuangan syari'ah tidak ada istilah kredit.
4. BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal harus berpegang teguh pada prinsip syari'ah.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang menguasai seluruh alam, hanya dengan rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang sangat sederhana ini. Penulis sadar tentu dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan baik dalam segi bahasa maupun tulisan. Untuk itu penulis akan menerima dengan senang hati segala masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhirnya penulis berdo'a dan berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Semoga segala daya dan upaya serta kekuatan senantiasa teriring rahmat dan keselamatan dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: RAJAWALI PERS, 2010
- Arya Manggala Yudha, "*Eksekusi Lelang Objek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Oersero) Tbk Cabang Jember*", Skripsi Sarjana Universitas Jember (2008)
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: KENCANA PERNADA MEDIA GROUP, 2007
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Djumhana, Muhammad *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 200
- Dokumentasi BMT SM NU Al-Amanah Tarub Tegal yang dikutip pada tanggal 11 Februari 2016
- Gemala Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media, 2005

- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, Jakarta KENCANA PERNADA MEDIA GROUP, 2010
- Hadi, Sholikhul dan Muhammad, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian Nasional*, edisi 1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995
- Hasbi ash Shiddieqy, Muhammad *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999
- Huda, Nurul, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Istiani, Tita, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan pada PT. BPR Syari’ah Artha Surya Barokah Semarang*”, Skripsi, Semarang: Universitas Stikubank (UNISBANK), 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet 21, 2005.
- Masjchoen, Sri Soedewi, *Hukum Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980
- Mohammad Kadhapi, “*Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur di Medan*”, Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan (2012)

- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKN, 2002
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press 2008.
- Naja, H.R Daeng, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Rahman, Hasanudin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995
- Rahmat Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia, 2001
- Rico, “*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Tidak Bersertifikat pada PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO) di Pekanbaru Tahun 2009*”, Tesis, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2010.
- Ridwan, Muhamad, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: pustaka SM, 2007.
- Ridwan, Muhamad, *MANAJEMEN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shaleh, Syaikhbin Fauzan Al Fauzan, *Mulakhhkas Fiqhi, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet VI, Jakarta: Intermasa, 1996.

- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonsia, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002
- Suyitno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia, 2003
- Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah
- T Yanggo, Chuzaimah dan Hafis Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi ke-3, Jakarta: LSIK, 1997
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Wahbah az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, juz 6, Jakarta: Gema Insani , 2011
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Wawancara dengan Bapak H. Muhsin, S.HI selaku maneger dan Ibu Cholipah selaku kasir pada tanggal 11 Februari 2016
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994
- Zulkifili, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lisa Indah Purwitasari
Nim : 122311063
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 13 Desember 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Rancawiru Rt 01 Rw 02
Kec. Pangkah Kab Tegal

Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi, lulus tahun 2000
2. SD Negeri Rancawiru 01, lulus tahun 2006
3. MTS Negeri Slawi, lulus tahun 2009
4. SMA Hasyim Asy'ari Tarub. lulus tahun 2012

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang Program SI Jurusan
Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2012

Semarang, 1 Juni 2016

LISA INDAH PURWITASARI
122311063



UNIT JASA KEUANGAN SYARI'AH

BMT SM NU AL AMANAH TARUB

Kantor Pusat : Jl. Raya Karangjati Tarub - Tegal ☎ (0283) 3447869 - 3287320
Kantor Kas : 1) Sebelah Timur Pasar Kemantran, 2) Jl. Raya Lebaksu No. 16 Lebaksu

*"Hai orang-orang yang beriman
Penuhilah akad-akad (Perjanjian)
QS. Al Maidah 13)*

Barang siapa meminjam dengan tekad mengembalikan,
maka Allah akan memberikan barokah dan membantu
melunasinya dan barang siapa meminjam dengan niat
tidak mengembalikan, maka Allah akan membuatnya
harta itu tidak barokah dan membuat bangkrut
(HR. Abu Hurairah ra.)

Tidak akan masuk surga orang-orang
yang punya hutang, sebelum hutang itu
dibayar (Al Hadits)

IDENTITAS ANGGOTA

Nama :
Alamat :
No. Rekening :
Tgl. Pembiayaan :
Jatuh Tempo :
Flafon :
Periode :
Jangka Waktu :
Angsuran Pokok :
Angs. Basil :
Jumlah Angsuran :
Jaminan :

KEWAJIBAN SEORANG NASABAH

1. Dalam mengangsur Pinjaman harus datang sendiri ke kantor BMT SM NU Al Amanah Tarub
2. Mengangsur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Nasabah dengan BMT SM NU Al Amanah
3. Apabila Nasabah tidak dapat mengangsur pada tanggal yang ditentukan, maka setoran selanjutnya harus setor 2 angsuran
4. Apabila sudah jatuh tempo pinjaman dan nasabah belum melunasi maka nasabah dikenakan denda 2 % dari saldo akhir.

KARTU ANGUSARAN PEMBIAYAAN BMT SM NU AL AMANAH TARUB - TEGAL

No.	Tanggal	Pokok	Basil	Saldo	Val.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

No.	Tanggal	Pokok	Basil	Saldo	Val.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



**BMT SM NU
AL AMANAH**
KARANGJATI - TARUB

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN

No. Rek. Pembiayaan :

No. Rek. Simpanan :

Bismillahirrohmaanirrohiim

Kami mengajukan permohonan pembiayaan untuk sendiri / instansi dengan keterangan sebagai berikut :

A. DATA PERSONAL

Nama Pemohon	Nama Suami / Istri	Tempat / Tgl. Lahir Pemohon
Jama'ah Masjid/Mushola	Jumlah Anggota Keluarga	Alamat Tinggal (sesuai KTP) & No. KTP

B. STATUS TEMPAT TINGGAL

☐ Milik sendiri ☐ Kontrak ☐ Milik orang tua ☐ Lain-lain

C. TUJUAN PENGGUNAAN

☐ Modal Usaha / BBA ☐ Investasi / MDA ☐ Konsumtif ☐ Lain-lain

Jenis Usaha / Pekerjaan	Tempat Usaha / Pekerjaan	Lama Usaha / Pekerjaan

D. PENGHASILAN USAHA / PEKERJAAN

Pokok	Tambahan	Total Penghasilan
Rp.	Rp.	Rp.
Penghasilan tambahan diperoleh dari :		

E. PERNAH / BELUM PERNAH MENGAJUKAN PEMBIAYAAN DI BMT DAN TEMPAT LAIN :

Nama Lembaga / Instansi	Pembiayaan ke :	Jatuh Tempo

F. RENCANA PEMBIAYAAN

Jumlah yang diajukan	Rencana Pengembalian	Jaminan
Rp.	H / M / B / Tempoan	
Pokok	Bagi Hasil	Jumlah
Rp.	Rp.	Rp.

G. KEBUTUHAN MODAL

Modal Sendiri	Modal Tambahan	Total Kebutuhan Modal
Rp.	Rp.	Rp.

H. KESEDIAAN SURVEY

Hari dan Tanggal sampai dengan :	Jam	Tempat	
		<input type="checkbox"/> Rumah	Telp.
		<input type="checkbox"/> Kantor	Telp.

Demikian pengajuan pembiayaan dari kami, atas diperkenankannya disampaikan terima kasih.

- ☐ FC. Kartu Tanda Penduduk
☐ FC. Kartu Tanda Penduduk Suami / Istri
☐ FC. Kartu Keluarga
☐ FC. Ijin Usaha / SIUP dan NPWP
☐ FC. Surat Bukti Hak Milik atas Jaminan

Tanggal

PEMOHON,

(.....)

I. ANALISA PEMBIAYAAN ACCOUNT OFFICER

- ☐ Merekomendasikan
☐ Menolak

Dengan Ketentuan :

Jumlah Pencairan : Rp. Keterangan :
 Pokok Angsuran : Rp.
 Bagi Hasil : Rp.
 Total Angsuran : Rp.
 Sistem Angsuran : H / M / B / Tempoan Selama H / M / B / Tempoan



**BMT SM NU
AL AMANAH**
KARANGJATI - TARUB

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN

No. Rek. Pembiayaan :
No. Rek. Simpanan :

Bismillahirrohmaanirrohiim

Kami mengajukan permohonan pembiayaan untuk sendiri / instansi dengan keterangan sebagai berikut :

A. DATA PERSONAL

Nama Pemohon	Nama Suami / Istri	Tempat / Tgl. Lahir Pemohon
Jama'ah Masjid/Mushola	Jumlah Anggota Keluarga	Alamat Tinggal (sesuai KTP) & No. KTP

B. STATUS TEMPAT TINGGAL

☐ Milik sendiri ☐ Kontrak ☐ Milik orang tua ☐ Lain-lain

C. TUJUAN PENGGUNAAN

☐ Modal Usaha / BBA ☐ Investasi / MDA ☐ Konsuntif ☐ Lain-lain

Jenis Usaha / Pekerjaan	Tempat Usaha / Pekerjaan	Lama Usaha / Pekerjaan

D. PENGHASILAN USAHA / PEKERJAAN

Pokok	Tambahan	Total Penghasilan
Rp.	Rp.	Rp.
Penghasilan tambahan diperoleh dari :		

E. PERNAH / BELUM PERNAH MENGAJUKAN PEMBIAYAAN DI BMT DAN TEMPAT LAIN :

Nama Lembaga / Instansi	Pembiayaan ke :	Jatuh Tempo

F. RENCANA PEMBIAYAAN

Jumlah yang diajukan	Rencana Pengembalian	Jaminan
Rp.	H / M / B / Tempoan	
Pokok	Bagi Hasil	Jumlah
Rp.	Rp.	Rp.

G. KEBUTUHAN MODAL

Modal Sendiri	Modal Tambahan	Total Kebutuhan Modal
Rp.	Rp.	Rp.

H. KESEDIAAN SURVEY

Hari dan Tanggal sampai dengan :	Jam	Tempat	
		<input type="checkbox"/> Rumah	Telp.
		<input type="checkbox"/> Kantor	Telp.

Demikian pengajuan pembiayaan dari kami, atas diperkenankannya disampaikan terima kasih.

- ☐ FC. Kartu Tanda Penduduk
☐ FC. Kartu Tanda Penduduk Suami / Istri
☐ FC. Kartu Keluarga
☐ FC. Ijin Usaha / SIUP dan NPWP
☐ FC. Surat Bukti Hak Milik atas Jaminan

Tanggal

PEMOHON,

(.....)

I. ANALISA PEMBIAYAAN ACCOUNT OFFICER

- ☐ Merekomendasikan
☐ Menolak

Dengan Ketentuan :

Jumlah Pencairan : Rp. Keterangan :
 Pokok Angsuran : Rp.
 Bagi Hasil : Rp.
 Total Angsuran : Rp.
 Sistem Angsuran : H / M / B / Tempoan Selama H / M / B / Tempoan

Tanda tangan

MANAGER

- ☐ Mendukung
☐ Menolak

PENGURUS

- ☐ Menyetujui
☐ Menolak



LEMBAGA KEUANGAN SYAR'AH
BAITUL MAAL WATTAMWIL SYIRKAH MUAWANAN NAHDATUL ULAMA
BMT SM NU AL AMANAH TARUB
BADAN HUKUM NO. 790/PDA/294/2007
NPWP :01.811.804.2.501.000
Jl. Raya Karangjati No.25 Tarub Tegal 52184 (0283) 3287320

**PERJANJIAN KREDIT, PENGAKUAN HUTANG, PEMBERIAN JAMINAN DAN PERNYATAAN
KESANGGUPAN PEMBAYARAN**

Nomor : _____ / BMT SM-NU AL AMANAH/ _____ / _____ / _____

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :

Jabatan :

Dalam hal ini bertindak atas nama BMT SM-NU AL AMANAH TARUB dan selanjutnya disebut Pihak I

II. Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

Pekerjaan :

Untuk perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istri/ suami / penjamin:

Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

Pekerjaan :

Untuk selanjutnya disebut Pihak II / Nasabah.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu, bahwa Pihak II telah mengajukan permohonan kepada Pihak I untuk memberikan fasilitas kredit untuk keperluan Pihak II (Nasabah), dan Pihak I setuju untuk memberikan fasilitas kredit tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak I memberikan fasilitas kredit pokok sebesar Rp. _____
(_____)

Jangka waktu perjanjian ini adalah _____ (*Harian / Mingguan / Dua
Mingguan / Bulanan/ Tempo dengan bagi hasil/ Margin sebesar _____ efek per bulan terhitung sejak tanggal hari ini
dan akan berakhir pada tanggal _____.

Berdasarkan perhitungan Pihak I dan atas permohonan Pihak II, kedua belah pihak dapat memperpanjang perjanjian ini
dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian oleh Pihak I.

Pasal 2

Pihak II dengan ini mengaku berhutang kepada pihak I sejumlah tersebut pada pasal I dan mengaku telah menerima
uang sejumlah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kwitansi pembiayaan tertanggal _____ yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 3

1. Kredit yang diberikan oleh Pihak I baik berupa pokok berikut Bagi Hasil/ Margin dan biaya-biaya lainnya
harus dibayar lunas seluruhnya oleh Pihak II dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Jumlah hutang pokok sebesar Rp. _____ Ditambah Bagi Hasil/Margin Rp. _____
_____ Akan dibayar dengan cara angsuran *Harian / Mingguan / Dua Mingguan / Bulanan/ Tempo
sebesar Rp. _____ Dengan perincian, angsuran pokok Rp. _____, angsuran Bagi
Hasil/Margin Rp. _____ /khusus untuk Bagi Hasil Tempoan dibayar setiap bulan dan pokok
dibayarpada saat jatuh tempo atau sesuai dengan ketentuan BMT SM-NU AL AMANAH Kec. Tarub. (*Coret

Pasal 4

1. Untuk fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Pihak II memberikan jaminan berupa:
 - a. _____
 - b. _____
 - c. _____
2. Barang-barang tersebut dalam pasal 4 ayat 1 diserahkan kepada Pihak I untuk selanjutnya akan diambil kembali oleh Pihak II setelah menyelesaikan kewajiban berdasarkan perjanjian ini menyangkut hutang pokok, Bagi Hasil dan denda serta kewajiban lain sebagai akibat dari cidra janji.
3. Pihak I atau siapa pun atas kuasa Pihak I berhak setiap saat untuk melihat dan memeriksa keberadaan barang-barang jaminan sebagai mana dimasukkan pada pasal 4 ayat 1 serta berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan apabila Pihak II mengingkari perjanjian ini.
4. Apabila Pihak II tidak dapat melunasi atau tidak menyelesaikan kewajiban kepada Pihak I sesuai dengan perjanjian ini, maka Pihak II secara otomatis sudah memberi kuasa penuh kepada Pihak I untuk menyita barang-barang jaminan tersebut pada pasal 4 ayat 1 kapanpun, dimanapun dan siapapun atas kepemilikan barang-barang jaminan tersebut.
5. Untuk melunasi kewajiban Pihak II, barang-barang tersebut akan dilelang. Jika hasil lelang belum cukup untuk melunasi, maka Pihak II harus bertanggung jawab dan bersedia melunasi sisanya, jika terjadi sebaliknya, maka kelebihan hasil lelang akan dikembalikan kepada Pihak II.

Pasal 5

1. Pihak II dengan ini memberikan hak penuh kepada Pihak I untuk mendebet Simpanan atas nama nasabah yang bersangkutan untuk melunasi kewajibannya kepada Pihak I.
 2. Pihak II setuju bahwa pembukuan Pihak I merupakan bukti satu-satunya yang sah dan mengikat kedua belah pihak mengenai jumlah terhutang yang wajib dibayar dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak di muka Pengadilan.
- Pihak II melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut.

Pasal 6

Selama kewajiban pembayaran kepada Pihak I belum dilunasi, Pihak II wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Menggunakan dana pinjaman ini untuk usaha sebagaimana tercantum dalam permohonan pembiayaan.
2. Mendahulukan pembayaran apapun berdasarkan perjanjian ini dari pembayaran-pembayaran lain yang menjadi kewajiban Pihak II.

Pasal 7

Pihak II dengan ini menyatakan tunduk kepada semua peraturan dan kebijaksanaan mengenai system pembiayaan yang ada pada Pihak I sekarang dan yang akan diadakan kemudian. Kedua belah pihak sepakat untuk menundukan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini pada hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia. Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah kepada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tegal dan atau di Pengadilan Negeri di tempat jaminan berada, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Pihak I untuk mengajukan tuntutan / gugatan hukum terhadap Pihak II di hadapan Pengadilan lain dimanapun. Pihak II menerima dengan baik serta tunduk kepada Pengadilan ke hadapan siapapun tuntutan/ gugatan hukum tersebut diajukan oleh Pihak I.

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN:

Pihak I,

Penjamin,

Pihak II,

BMT SM-NU AL AMANAH

Nasabah

Istri / Suami



BAITUL MAAL WAT TAMWIL SYIRKAH MUAWANAH (BMT SM)
NANDLATUL 'ULAMA
AL-AMANAH

Kantor : Jl. Raya Karangjati Tarub Tegal 52184 Telp. (0283) 315374

**PERJANJIAN KREDIT, PENGAKUAN HUTANG
DAN PEMBERIAN JAMINAN**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Manager BMT SM NU AL AMANAH yang berkedudukan di Jl. Raya Karangjati - Tarub Kabupaten Tegal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BMT SM NU AL AMANAH Tarub - Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut BMT SM NU AL AMANAH.
- II. Nama Alamat
Berkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut PEMINJAM.

Para pihak penerangan terlebih dahulu, bahwa PEMINJAM telah memohon kepada BMT SM NU AL AMANAH untuk memberikan fasilitas kredit untuk keperluan usaha PEMINJAM, dan BMT SM NU AL AMANAH setuju untuk memberikan fasilitas kredit tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

BMT SM NU AL AMANAH memberikan fasilitas kredit pokok maksimal Rp.
(.....) Jangka waktu perjanjian ini adalah bulan dengan Bagi Hasil / Margin sebesar efektif per bulan, terhitung sejak tanggal hari ini dan akan berakhir pada tanggal Berdasarkan pertimbangan BMT SM NU AL AMANAH terdiri atas dan atas permohonan dari PEMINJAM, BMT SM NU AL AMANAH dapat memperpanjang Perjanjian ini dengan jangka waktu, jumlah dan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh BMT.

PASAL 2

PEMINJAM dengan ini mengaku berhutang kepada BMT SM NU AL AMANAH sejumlah tersebut pada pasal 1 diatas, dan mengaku telah menerima uang sejumlah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kwitansi penerimaan uang tertanggal hari ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 3

1. Kredit yang diberikan oleh BMT baik berupa pokok berikut Bagi Hasil / Margin dan biaya-biaya lainnya harus dibayar lunas seluruhnya oleh PEMINJAM dalam jangka waktu, bulan dan atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang.
2. Jumlah hutang pokok sebesar Rp. ditambah dengan Bagi Hasil / Margin Rp. akan dibayar dengan cara Bagi Hasil / Margin dibayar selambat-lambatnya tanggal pada tiap bulannya dan pokok pada saat jatuh tempo perjanjian kredit.
3. Bila terjadi terlambat angsuran tiap bulannya sejumlah angsuran bulanan, Peminjam dikenakan denda pinjaman sebesar % per bulan atas jumlah angsuran yang tertunggak.
4. BMT SM NU AL AMANAH sewaktu-waktu dapat merubah prosentase Bagi Hasil / Margin dan prosentase denda pinjaman ini sesuai dengan perkembangannya dengan ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh BMT.

Guna menjamin pembayaran lunas sebagaimana mestinya semua jumlah yang tertuang dan wajib dibayar oleh Peminjam kepada BMT SM NU AL AMANAH berdasarkan Perjanjian, baik jumlah pokok pinjaman, Bagi Hasil / Margin, provisi, denda dan biaya lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian antara notaris, pengacara, dengan ini Peminjam dan / atau pihak lain yang memberikan jaminan (selanjutnya disebut Peminjam) memberikan kepada BMT SM NU AL AMANAH jaminan kredit berupa :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PASAL 5

Pinjaman dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada BMT SM NU AL AMANAH setiap waktu dan dari waktu ke waktu yang ditetapkan oleh BMT SM NU AL AMANAH sendiri untuk mendebet tabungan pada BMT SM NU AL AMANAH, hingga jumlah yang besarnya ditetapkan oleh BMT SM NU AL AMANAH. Berdasarkan perhitungan BMT dan menggunakan jumlah tersebut untuk membayar kembali semua jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Peminjam kepada BMT berdasarkan Perjanjian baik untuk pinjaman pokok, Bagi Hasil / Margin, denda dan biaya lainnya.

PASAL 6

Peminjam setuju bahwa Pembukuan BMT tersebut merupakan bukti satu-satunya yang sah dan mengikat terhadap peminjam mengenai jumlah tertuang dan wajib dibayar oleh Peminjam kepada BMT berdasarkan perjanjian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan sempurna dimuka pengadilan. Peminjam melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas pembuktian tersebut.

Apabila BMT dalam melaksanakan hak-haknya untuk mendapatkan kembali jumlah uang yang terhutang berdasarkan Perjanjian, melakukan penjualan atas barang-barang jaminan sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 Perjanjian ini.

Apabila hasil penjualan jaminan tersebut ternyata tidak cukup untuk membayar seluruh jumlah yang terhutang kepada BMT, maka Peminjam tetap bertanggung jawab dan wajib membayar seluruh sisa hutangnya kepada BMT hingga lunas sama sekali.

PASAL 7

Sehubungan dengan penyediaan fasilitas kredit yang tercantum dalam Perjanjian ini, dengan ini Peminjam menyatakan dan menjamin :

1. Pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan perjanjian tidak melanggar suatu peraturan perundangan negara Republik Indonesia, suatu perjanjian, dokumen, janji atau perikatan lain dimana Peminjam menjadi pihak didalamnya.
2. Tidak ada tuntutan / sengketa terhadap Peminjam dan / atau Penjamin maupun terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan.

PASAL 8

Selama seluruh kewajiban pembayaran kepada BMT belum dilunasi. Peminjam wajib melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Menggunakan dana pinjaman ini untuk usaha sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
2. Senantiasa memberikan ijin kepada BMT dan / atau pihak yang ditunjuk oleh BMT untuk setiap saat yang diperlukan untuk memeriksa barang-barang jaminan dimanapun barang-barang tersebut berada, dan melakukan peninjauan ke tempat usaha Peminjam termasuk namun tidak terbatas pada bangunan-bangunan lain yang dipergunakan oleh Peminjam sebagai tempat usaha.
3. Memberikan kepada BMT segala informasi / keterangan dan data-data, bila terjadi perubahan dalam arti sifat dan ruang lingkup usaha Peminjam, bilamana terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan usaha atau keuangan Peminjam, setiap waktu baik diminta maupun tidak diminta oleh BMT
4. Mendahulukan pembayaran apapun berdasarkan perjanjian ini dari pembayaran-pembayaran lain yang menjadi

PASAL 9

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMT, Peminjam tidak akan :

1. Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha Peminjaman sehari-hari.
2. Menjamin, atau menggadaikan, menjual dan / atau mengalihkan hak atau menyewakan / menyerahkan kepada pihak ketiga maupun juga bidang tanah dan / atau bangunan, barang-barang yang telah dijamin untuk fasilitas kredit ini.
3. Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari BMT dan / atau lembaga keuangan lainnya.

PASAL 10

Menyimpang dari jangka waktu yang disebut dalam Pasal 1 diatas, BMT berhak untuk mengakhiri Perjanjian dan dalam hal demikian seluruh kewajiban Peminjam terhadap BMT, baik karena hutang pokok, Bagi Hasil / Margin denda dan biaya-biaya lainnya yang tertuang berdasarkan perjanjian, dapat ditagih dan harus dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus lunas seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran, juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu.

Peminjam dengan ini menyatakan tunduk kepada semua peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai pinjaman yang ada pada BMT sekarang dan yang akan diadakan kemudian dan para pihak bersama ini menyetujui untuk menundukkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini pada hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Perjanjian tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani para pihak dalam perjanjian.

Semua biaya sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dan pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris dan pengacara, wajib ditanggung dan dibayar oleh peminjam.

BMT berhak mengoperkan, mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga manapun menurut pertimbangan BMT tanpa persetujuan Peminjam.

BMT berhak memberikan informasi mengenai Peminjam serta segala sesuatu yang mengenai atau berhubungan dengan perjanjian kepada orang/pihak lain, sehubungan dan dalam rangka mengalihkan atau mengoperkan hak, wewenang serta kewajiban BMT, serta instansi yang berwenang sehubungan dan dalam rangka melaksanakan hak dan wewenang BMT berdasarkan Perjanjian.

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tegal dan / atau di Pengadilan Negeri di tempat jaminan terletak / berada, dengan tidak mengurangi hak dan wewenang BMT untuk mengajukan tuntutan / gugatan hukum terhadap Peminjam di hadapan Pengadilan lain dimanapun dan Peminjam dengan ini menyatakan menerima baik serta tunduk kepada hukum Pengadilan ke hadapan siapapun tuntutan / gugatan hukum tersebut diajukan oleh BMT.

Tarub,

BMT SM NU AL AMANAH

Penjamin,

Peminjam,

Istri / Suami,

BUKTI WAWANCARA

1. Apa saja yang dilakukan di BMT? Apakah hanya melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan menabung, pembiayaan atau ada juga kegiatan menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah?
2. Apa visi dan misi BMT?
3. Apakah pernah ada kendala yang dialami oleh nasabah atau BMT?
4. Rata-rata nasabah berprofesi sebagai apa?
5. Menggunakan sistem apa saja yang dilakukan di BMT ini?
6. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan kredit? apakah lancar atau ada kendala?
7. Akad apa yang dilakukan dalam perjanjian kredit?
8. Bagaimana pelaksanaan kredit?
9. Apakah ada kelebihan dari pembayaran kredit? Sebagai bunga/bagi hasil?
10. Apakah harus ada jaminan dalam kredit?
11. Apa manfaat jaminan kredit?
12. Bagaimana praktek jaminan dalam kredit?
13. Apa saja yang dijadikan jaminan?
14. Apakah ada biaya untuk perawatan jaminan?
15. Bagaimana cara dan sistem pengembalian jaminan ketika kreditnya sudah lunas?
16. Bagaimana barang jaminan ketika pembayaran kredit belum lunas?

Tegal, 15 juni 2016

Hormat Saya,

